



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN (PDP),
DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (PEID-DDT), DIRJEN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PPDT), DAN DIRJEN
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
(PPKT) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : III
Masa Persidangan : 2022-2023
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 8 Februari 2023
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. (F-PPP) – Wakil
Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2022;
2. Membahas Program Kerja Tahun 2023;
3. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR
RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
44 dari 56 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
9 dari 12 orang Anggota
 1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 2. Mochamad Herviano
 3. Sukur H. Nababan, S.T.
 4. Ir. Sudjadi
 5. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
 6. Sri Rahayu
 7. Ir. Effendi Sianipar
 8. Harvey B. Malaihollo
 9. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae

2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. Cen Sui Lan
4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
6. Ilham Pangestu
7. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)

5 dari 7 orang Anggota

1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
2. Ir. Sumail Abdullah
3. Sudewo, S.T., M.T.
4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

4 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Tamanuri, M.M.
2. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
4. Sri Wahyuni

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. H. Ruslan M. Daud
2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
2. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
3. Lasmi Indaryani, S.E.
4. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)

4 dari 5 orang Anggota

1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
2. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
3. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.
4. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

4 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
3. H. Boyman Harun, S.H.
4. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Dirjen PDP Kementerian Desa PDT Transmigrasi RI (Sugito, S.Sos., M.H.)
2. Dirjen PEID-DTT Kementerian Desa PDT Transmigrasi RI (Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si.)
3. Dirjen PPDT Kementerian Desa PDT Transmigrasi RI (Ir. Eko Sri Haryanto, M.M.)
4. Dirjen PPKT Kementerian Desa PDT Transmigrasi RI (Ir. Rajumber Prihatin, M.Si.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F – PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E, M.Com.):

Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan,
Pak Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, *oh*, Ibu ya,
mohon maaf Bu, kemudian
Pak Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Pak Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, beserta
Seluruh jajarannya,
Hadirin-hadirat yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama hadir pada Rapat Dengar Pendapat.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat yang hadir, Anggota pada pagi hari ini berjumlah 22 orang, fisik 5 orang dan *virtual* 17 orang. Kemudian, jumlah

Fraksi yang hadir 7 Fraksi, artinya ini sudah memenuhi kuroum Fraksi, menurut tata tertib DPR. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membuka rapat ini.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

**Anggota Komisi V,
Pak Dirjen yang berbahagia.**

Untuk agenda pertama, terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2022, Komisi V ingin mendapatkan penjelasan dari pa...dari para Dirjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bagaimana hasil akhir pencapaian realisasi anggaran masing-masing unit Eselon I pada tahun 2022 sesuai saran dan masukan yang telah diberikan oleh Komisi V, pada rapat-rapat sebelumnya.

Adapun terkait dengan agenda kedua yaitu, pembahasan program kerja Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan bahwa Pagu Anggaran Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan sebesar 234,35 miliar, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar 230,45 miliar, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar 90,56 miliar, dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar 251,55 miliar.

Dengan alokasi anggaran ini, kami ingin mengetahui bagaimana Pagu Anggaran ini direalisasikan sesuai dengan rencana program kegiatan yang sudah disampaikan pada rapat-rapat terdahulu.

Selanjutnya, kami ingin pula mendapatkan penjelasan tentang rencana *automatic adjustment* pada masing-masing unit organisasi Eselon I, tersebut.

Berdasarkan, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari para Dirjen, antara lain: yang pertama, perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai kebijakan prioritas penggunaan dana desa termasuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi dana desa dan fasilitas pemanfaatan dana desa tersebut.

Kedua, dibutuhkan pengembangan produk unggulan desa melalui BUMDes yang dapat meningkatkan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Ketiga, perlunya kebijakan yang dapat mendorong dan memperluas peningkatan konektivitas penyediaan sarana dan prasarana dasar di daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pulau kecil terdepan, dan terluar.

Kemudian yang keempat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan layanan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Saya kira demikianlah pengantar dari kami. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Pak Dirjen dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menyampaikan penjelasan. Mungkin bisa dimulai dari Pak, ini dulu ya, Pak Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, selanjutnya nanti Bapak-Ibu dan Bapak terakhir. Ya silakan Pak, waktu dan tepat kami persilakan.

DIRJEN PPDT KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (Ir. EKO SRI HARYANTO, M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan RDP pada pagi hari ini, Bapak Wakil Ketua,
Yang saya hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI, dan Sahabat-sahabat, kolega kami yang ada di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. pada kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan dulu perkenalan dari kami. Kami dari-dari Dirjen PDP dulu, Dirjen PDP Bapak Sugito. Yang berikutnya, di sini yang paling cantik *nih* Pak, Ibu Harlina Sulistyorini beliau adalah Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan, Bapak Rajumber Prihatin, Dirjen...Plt Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan kami sendiri Eko Sri Haryanto Direktur Jenderal PPDT (Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal).

Bapak-Ibu yang kami hormati dan kami muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini kami akan sampaikan perkembangan sekaligus juga untuk tahun 2023. Langsung saja kami ingin sampaikan.

Jadi, capaian untuk IKU Dirjen PPDT pada halaman 3, langsung capaiannya. Jadi, hasil dari capaian untuk tahun 2022 di IKU, Dirjen PPDT yang pertama adalah pembangunannya komitmen lintas K/L. Jadi, di PPDT itu adalah menjalankan strategi nasional PPDT, itu ada diampu oleh beberapa Kementerian dan Lembaga dan targetnya adalah afirmasi 50% capaian kita 60,14%.

Yang berikutnya adalah meningkat, meningkatnya daerah tertinggal untuk berpotensi terentaskan sesuai dengan indeks ketertinggalan. Jadi, ditarget kita adalah 52,84. Kita bisa mencapai di dalam indeks untuk rata-rata di 62 daerah tertinggal itu 53,78.

Yang berikutnya adalah sasaran untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal. Ini ada dua indikator, yang pertama adalah persentase penduduk miskin dan rata-rata indeks pembangunan manusia. Yang untuk penduduk miskin 24,8 targetnya kita mencapai 24,56. Yang berikutnya, juga rata-rata untuk indeks pembangunan manusia targetnya 61 kita bisa mencapai 61,27.

Yang berikutnya adalah sasaran program untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung Dirjen PPDT, nilai SAKIP, 81 targetnya kita bisa mencapai 81,91. Dan, untuk penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi targetnya 84, kita bisa mencapai 86,48.

Yang terakhir, di dalam sasaran program terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal atau APIP ini kita targetnya 71%, kami belum bisa mencapai karena 61,40. Jadi, kalau kita di rata-rata sebenarnya kita sudah mencapai pada tingkat kategori sangat baik.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Selanjutnya, kami akan sampaikan alokasi anggaran untuk di Dirjen PPDT tahun 2022, ini setelah adanya beberapa blokir yang tidak bisa kita gunakan. Jadi, ini adalah pagu akhir untuk efektif, itu adalah 68,8 miliar yang terdiri dari satu Sekretariat Direktorat Jenderal dan lima Direktorat.

Yang berikutnya, kami ingin sampaikan kronologis dari perubahan-perubahan anggaran dari mulai DIPA 1 sampai DIPA 12. Jadi, kita banyak sekali perubahan-perubahan di dalam anggaran, sehingga mencapai pada posisi efektivitas kita adalah dana di 62...68,83 miliar tadi.

Pagu yang yang awal kita 82.590.648.000,- Pagu awal. Tapi ada beberapa DIPA yang karena blokir Tukin, lalu berikutnya juga ada blokir untuk *automatic adjustment* yang pertama, lalu kedua, lalu kita buka blokir lagi dan sebagainya, kita sampai pada posisi di efektivitas dana kita, yang kita gunakan 68,8 miliar adalah kronologis dari beberapa perubahan karena ada pemblokiran.

Yang berikutnya adalah komposisi anggaran di Dirjen PPDT tahun 2022, ini komposisinya adalah untuk belanja pegawai, 39% dan belanja barang di 61%. Dari 61% kita *breakdown* di dalam belanja barang non operasional dan belanja barang operasional. Belanja barang di non operasional 77% dan belanja barang untuk operasional di 23%.

Selanjutnya, Bapak-Ibu yang kami hormati,

Kami ingin sampaikan untuk realisasi penyerapan anggaran. Jadi, pada posisi terakhir realisasi akhir di 10 Januari tahun 2023 kita mencapai 97,82%. Jadi, kita masih menyisakan sebenarnya kalau diuangkan sisanya adalah 2,1 miliar.

Dengan demikian sebenarnya kalau kita melihat kurva S, jadi kita belum bisa mencapai pada target karena masih selisih atau jeda satu persen. Ini sebenarnya juga ada beberapa kesalahan di dalam kebijakan di keuangan, nanti kami akan sampaikan.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Selanjutnya kami akan sampaikan capaian untuk kegiatan di tahun 2022. Yang pertama adalah penyusunan dokumen untuk kegiatan kita, ini terselesaikan tiga rekomendasi untuk kebijakan. Yang berikutnya adalah kegiatan sarana prasarana di Rote, Rotedau. Dan, kegiatan untuk air bersih, lalu kegiatan untuk prasarana produksi prokades, di Pulau Sula, Kepulauan Sula, itu 100%.

Yang berikutnya untuk peningkatan kapasitas tenaga di bidang pendidikan itu 100% tercapai, peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang kesehatan dan upaya pencegahan *stunting*, itu di Sumba Barat dan Tojo Una-Una, realisasi 100 orang dan tercapai. Peningkatan kapasitas untuk masyarakat bidang kesehatan dan KB, tercapai di Tunggala dan Tanimbar 50 orang dan peningkatan kapasitas tenaga untuk bidang ekonomi 150 orang tercapai di daerah pesisir barat Musi Rawas Utara, Kupang, dan Sumba Barat Daya.

Lalu kegiatan-kegiatan di pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan itu kegiatannya adalah peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir tercapai 100% karena 200 orang, lalu pemberian sarana penumbuhan ekonomi kawasan pesisir lima unit untuk kegiatan ini adalah tercapai semua di Donggala, Tanimbar, Seram Bagian Barat, dan Timor Tengah Selatan.

Berikutnya adalah kegiatan (*suara kurang jelas*) masyarakat dalam aparaturnya untuk mitigasi dan kesiapan bencana tercapai sesuai dengan target 120 orang di Sorong. Lalu, pengembangan vegetasi dan mitigasi ini kita bisa selesaikan untuk penanaman di 20 hektar di Kupang dan di pesisir barat.

Yang berikutnya, kegiatan-kegiatan di pembangunan, Direktorat pembangunan kawasan pembangunan khusus, ini ada di penyediaan sederhana pasca panen pertanian di Kepulauan Sula dan peningkatan kapasitas masyarakat pertanian kelautan, di Asmat, Membrano Raya, Nabire dan Merauke. Ini terkait dengan sagu, yang lagi digalakkan lalu kita fasilitasi. Lalu, *pilot project* untuk peningkatan jalan desa strategis ini Inpres di Sambas kita selesai.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya, kami akan sampaikan pembahasan untuk Program Kerja Tahun 2023. Dari Alokasi Anggaran Tahun 2023, kami disediakan Rp90.564.634.000,-

Dalam hal ini, awal kita sudah mempersiapkan untuk blokir sesuai dengan keputusan pemerintah itu jumlahnya adalah 22% dari alokasi yang tersedia. Selain itu juga, kita masih ada blokir 2,04%. Sehingga, Pagu efektif kita adalah 68,4 miliar. *Nah*, hal ini karena khusus untuk reguler dan yang diblokir yang reguler ini, sebenarnya kita sudah selesai mempersiapkan sesuai dengan persyaratan yaitu, dari ketetapan KPA, ketetapan untuk pengguna anggaran sudah...sudah ada dan kita bisa lanjutkan untuk dibuka blokir, demikian juga untuk yang di 600 juta, itu juga sudah selesai karena sudah sepakat dengan pemerintah daerah, jadi segera kita lakukan.

Yang berikutnya komposisi per jenis belanja tahun 2023, untuk belanja barang 62,5 miliar atau 69% dan belanja pegawai 28,02 miliar atau 31%. Belanja barang kita bagi, itu kita kategorikan di dalam belanja non operasional 52,3 miliar atau 84%, dan untuk kegiatan belanja operasional kita 10,1 miliar.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Target IKU Tahun 2023 yang harus kita kejar dan kita lengkapi di dalam ini adalah berkurangnya jumlah daerah tertinggal. Jadi, khusus untuk daerah tertinggal memang kita akan melaporkan pada tahun 2024, itu sesuai dengan PP, amanat PP di PP 78 Tahun 2014.

Yang berikutnya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal, kita targetnya adalah 24,26%, lalu meningkatnya rata-rata indeks pembangunan manusia kita targetnya adalah 61,5%. Terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pembangunan daerah tertinggal, kita persentase yang perlu kita kejar adalah 70%, ini meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2022 kita targetnya 50%, tahun 2023 kita tingkatkan 70%. Sehingga, nanti harus intensif di dalam pola koordinasi dan sinergi dengan K/L.

Yang berikutnya adalah meningkatkan...meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Dirjen PPDT. Kita targetnya 85%, lalu meningkatnya akuntabilitas kinerja ini targetnya 83 poin, lalu meningkatnya penerapan pengendalian di Dirjen PPDT, itu nilainya 32 target kita 3,2, mohon maaf. Yang berikutnya adalah meningkatnya layanan kearsipan, ini kita targetnya 93 poin.

Yang berikutnya adalah terselesaikannya tidak lanjut temuan pemeriksaan eksternal dan aparat untuk yang APIP. Jadi, internal maupun yang eksternal target kita 72%, yang tahun kema...yang tahun 2022, kita baru bisa mencapai di 61%. Jadi, kita masih untuk meningkatkan.

Yang berikutnya kami ingin sampaikan Bapak-Ibu, rencana kegiatan prioritas Dirjen PPDT Tahun 2023, ini untuk penyerasian rencana, di penyerasian rencana dan program PPDT Pagu Efektif, karena ada pemotongan, ada pemblokiran maksud saya, itu efektif kita hanya 1,34 miliar. Di Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana, kegiatan pembangunan sarana air bersih ini efektifnya dana kita ada 1,37 miliar, yang sebelumnya 3,4 miliar. Lalu berikutnya adalah penyediaan sarana prasarana rumah produksi sagu dan rumput laut, ini di teluk Bintuni, ini 100 unit, ini tidak

ada pemotongan, 1,18 miliar. Lalu, yang berikutnya adalah *pilot* untuk pengembangan internet desa dan berbasis komunitas di Kepulauan Sula, ini pagu efektif menjadi 397 Juta dari 700 Juta.

Yang berikutnya untuk penyediaan sarana prasarana rumah produksi Kopra, ini di Kepulauan Sula, Pagu efektif kita menjadi 700 Juta dari semula 1,3 miliar.

Yang berikutnya Bapak-Ibu, di Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan. Kegiatan adalah peningkatan kapasitas tenaga kerja di bidang pendidikan dan pemberian sarana penunjang kegiatan pembelajaran Pagu efektif kita menjadi 773 juta, ini akan menyasar di 130 orang.

Yang berikutnya juga, peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang kesehatan dan upaya pencegahan *stunting* dan pemberian antro...*anthropometric kit*, ini...ini alat yang untuk kesehatan untuk mengukur tinggi badan anak, menimbang, dan sebagainya, ini 200 orang. Jadi Pagu efektif kita sekarang adalah 875 Juta.

Yang berikutnya juga peningkatan kualitas masyarakat di bidang kesehatan dan KB, ini Pagu efektif 300 juta. Lalu, peningkatan efektifitas tenaga bidang ekonomi dan pemberian sarana pengolahan komoditas Pagu efektif kita menjadi 1,2 miliar ini di beberapa kegiatan. Jadi, yang merah-merah itu yang kita blok untuk sementara.

Berikutnya, kami sampaikan untuk direktorat penyerasian sumber daya alam dan lingkungan itu adalah Pagu efektif untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelolaan kawasan pesisir adalah pengembangan untuk produk turunan, jadi 881 juta dari yang di semula 1,97 miliar. Jadi, akan dilaksanakan di pesisir barat.

Yang berikutnya untuk di pemberian stimulan pengelolaan kawasan pesisir, sementara ini adalah Pagu efektifnya nol, sehingga kita akan menunggu nanti masa untuk bisa dibuka blokir.

Berikutnya adalah penyelarasan pembangunan daerah khusus, ini adalah kegiatan-kegiatan *workshop* untuk diferensiasi turunan di Sagu dan ketahanan pangan, ini di Sorong, Kerong, dan Taliabu di 180 orang, lalu kegiatan *workshop* penggunaan pemasaran digital untuk desa wisata di Donggala dan Aru, 120 orang. Lalu kegiatan pembangunan prasarana amenities dan atraksi desa wisata ini 220 juta, Pagu efektifnya, jadi akan dilaksanakan nanti kalau sudah bisa kebuka semua nanti akan kita laksanakan semua juga.

Yang berikutnya untuk pengadaan-pengadaan alat untuk pengolahan sagu, ini mendukung kegiatan GEG, jadi *green economic growth* di Papua dan Papua Barat. Sekarang kita ada kerja sama jadi kita di Sorong, lalu pengadaan alat untuk pengelolaan sagu di PPKT, itu di Kepulauan Sula, pulau kecil terluar.

Berikutnya juga pembangunan jalan desa, ini strategis ini kena blokir untuk sementara tidak bisa dijalankan. Demikian juga Pagu efektif untuk pengadaan alat pengolahan rumput laut yang ada di Kepulauan Aru, jadi sementara ditiadakan nanti menunggu dari pembukaan blokir.

Yang berikutnya pengadaan untuk alat pengolahan rumput di GEG, satu unit di teluk Wondana dan Pagu efektif dan pembangunan embung di perbatasan untuk amanat Inpres 1 Tahun 2021 tentang Pembangunan Ekonomi dan di daerah perbatasan itu ada di dua unit, di Belu.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Rencana penarikan untuk tahun 2023, kita harapkan untuk penarikan dana kita bisa mencapai di 99,51% dan mudah-mudahan nanti bisa mencapai dengan kondisi yang buka dan tutup blokir *gitu*, ya.

Yang berikutnya adalah rencana pengadaan barang kita harapkan bisa 100%, apa yang sudah kita rencanakan dari kegiatan-kegiatan yang tadi kami laporkan.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Demikian, beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk target tahun 2023 juga sekaligus melaporkan untuk tahun 2022. Selanjutnya, kami mohon saran dan masukan dari Bapak-Ibu dan mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafan dan sementara kita akhiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kemudian, selanjutnya kita silakan kepada Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, silakan Pak.

DIRJEN PDP KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

**Yang saya hormati Pimpinan sidang,
Para Ketua,**

**Wakil Ketua,
Para Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Bapak-Ibu JPT Madya dan Pratama, serta
Seluruh hadirin sekalian,**

Izinkan kami dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan melaporkan progres pelaksanaan pada tahun 2022 dan nanti akan dilanjutkan dengan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Pada tahun 2022, kami laporkan bahwa, Pagu efektif pada akhir Tahun Anggaran yakni 209 miliar 860...maaf, Rp175.007.596.000,- di mana pada pagu awal sebenarnya adalah 29,867. Sehingga, terjadi ada *automatic adjustment* pada tiga kali bahkan sampai keempat pada selama perjalanan di tahun 2022 yakni ada 34,85 miliar.

Pagu tadi Bapak-Ibu sekalian, terdistribusi dari 175 tadi terdiri dari Rupiah Murni 142,9 miliar, pinjaman luar negeri 16,6 miliar dan hibah luar negeri yakni 10,7 miliar. Kemudian, ada hibah langsung dari UNICEF jadi 4,59 miliar.

Secara keseluruhan tadi terdistribusi pada 6 unit kerja Eselon II yakni baik itu ada di sekretariat maupun pada direktorat teknis bagaimana yang ada di layar. Mungkin tidak perlu kami sebutkan satu persatu, izin Pimpinan, kami langsung kepada penyerapan.

Pada tahun 2022, kami mencapai penyerapan pada 96,86% di mana dari target kami adalah 97,21% atau ada *gap* sekitar 0,35% dari keseluruhan anggaran di tahun 2022.

Pada *slide* berikutnya, realisasi dari masing-masing unit kerja Eselon II sebagaimana kita lihat pada sekretariat, yakni ada 98%, kemudian di perencanaan teknis 98,8%, di Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Desa dan Pedesaan 99,48%, kemudian di Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan 89,14%, Direktorat Advokasi dan Kerjasama 99,5% dan Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa 99,09%.

Kegiatan-kegiatan tersebut capaian yang perlu kami laporkan dalam forum ini, Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian, yakni untuk kegiatan pengembangan objek wisata desa dengan target di 100 desa tercapai sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing usulan yang ada di desa antara lain digunakan untuk kegiatan jalan lingkungan, membangun *homestay*, kios, gazebo, balai kesenian, toilet maupun Sarpras sesuai dengan kondisi dari masing-masing desa.

Kemudian, di dalam pengembangan atau revitalisasi pasar desa dan pedesaan ini, dengan anggaran 1 ko...10,7 miliar dengan target 20 desa ini juga tercapai utamanya kegiatan itu ada banyak pada fokus di bidang revitalisasi atau pengembangan, bukan membangun pasar baru. Jadi, sudah pasar-pasar yang sudah ada di desa.

Kemudian, pembangunan amenitas wisata di daerah tertinggal yakni dengan Pagu 3 miliar terhadap di 6 desa untuk kegiatannya sebagai sarana pendukung desa wisata di daerah tertinggal dengan menu kegiatan hampir sama dengan yang untuk pengembangan wisata yakni untuk *homestay*, jalan lingkungan, termasuk kios ataupun gazebo dan termasuk toilet dan sarana lainnya.

Kemudian, di pengembangan kawasan terpadu ada dua kegiatan pokok, yang pertama adalah dalam rangka untuk mempromosikan desa wisata di seluruh Indonesia ini yang ada di...kita menggelar namanya lomba promosi desa wisata. Kita gelar dua periode, periode Januari sampai Juni dan periode Juli sampai Desember, dan *alhamdulillah* sudah terlaksana dan ini ternyata juga banyak memberikan informasi-informasi terkait dengan potensi dan pengembangan wisata yang ada di desa dan memudahkan dalam rangka untuk memasarkan dari produk-produk destinasi wisata yang ada di desa kita. Kemudian, yang kedua adalah terkait dengan juga untuk pembangunan di kawasan, di pembangunan sarana pendukung wisata di kawasan pedesaan.

Berikutnya adalah pembangunan jalan untuk peningkatan prokades dan kegiatan ekonomi dengan Pagu 3,21 miliar dengan target 2,2 kilometer, untuk kegiatannya adalah pembangunan dan rehab jalan di kawasan pedesaan.

Kemudian, yang berikutnya adalah terkait dengan pembangunan sarana air bersih di KPPN, ini sebenarnya sudah sejak dua tahun ini tertunda terus karena adanya blokir atau *automatic adjustment* penyesuaian dengan anggaran sehingga baru bisa terealisasi pada tahun 2022 ini, yakni di kawasan pedesaan untuk pendukung kebutuhan sarana air bersih.

Kemudian untuk konvergensi pencegahan *stunting* di desa karena Kementerian Desa di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 menjadi salah satu tim dalam upaya percepatan penurunan konvergensi *stunting* di desa. Kemudian, kita melakukan sosialisasi konvergensi dengan *stunting* tadi di 100 desa dan *alhamdulillah* capaiannya 100%.

Kemudian, juga dalam rangka untuk mendukung SDGs yang ke-18 yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, kita juga fasilitasi terhadap desa tanggap budaya melalui bantuan di...melalui tiga kegiatan yakni sosialisasi terhadap hak asasi perempuan maupun di dalam rangka juga untuk mendorong bagaimana budaya di desa termasuk dalam angka untuk menghadirkan para kepala desa yang inspiratif, terutama kepala desa perempuan kita menggelar kemarin lomba kepala desa inspiratif dan *alhamdulillah* ternyata kepala desa di pelosok-pelosok negeri ada di Papua, di Talaut, ini juga banyak inspirasi-inspirasi yang mereka lakukan dalam membangun desa.

Kemudian, pengembangan desa inklusif dan anggota organisasi sosial sebagai upaya untuk mendorong bagaimana tata kelola di dalam pembangunan desa dan pedesaan, terutama dalam rangka akuntabilitas sosial dan inklusif yakni agar pelaksanaan pembangunan dilakukan benar-benar menggambarkan atas kebutuhan masyarakat, melibatkan seluruh elemen yang

ada di desa di tahun 2022 dengan target di 320 desa sebagai salah satu percontohan. Capaiannya sudah 100% di lakukan di beberapa daerah bekerja sama juga dengan NGO.

Kemudian, fasilitas pencegahan *stunting* melalui program ini yang merupakan dari bantuan luar, hibah luar negeri, yakni bagus 10,73 miliar dengan target ini di 223 kabupaten, kegiatannya adalah sosialisasi dan penguatan kapasitas dalam konvergensi pencegahan *stunting* desa, yakni sebagai upaya pemantauan terhadap balita melalui di Posyandu dengan sesama dengan kader dan para *stakeholder* yang ada di desa.

Pimpinan dan Bapak-Ibu seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,

Kemudian, kami juga melakukan fasilitasi terkait dengan penguatan ketahanan pangan selain yang ada di dana desa kita juga dalam rangka untuk memudahkan memberikan *guidance* bagi desa menyusun panduan-panduan, baik itu berbentuk keputusan menteri maupun turunannya dan kita juga melakukan sosialisasi Bimtek (*suara kurang jelas*) ketahanan pangan di lima kelompok yang ada di lima desa.

Kemudian (*suara kurang jelas*) bersih narkoba karena Kementerian Desa juga bagian dari Kementerian yang mendapatkan mandat dalam rangka RAN (Rencana Aksi Nasional) dari gerakan pemberantasan narkoba, kerja sama dengan BNN. Kita di tahun 2022 di 8 desa dan telah terlaksana.

Kemudian dalam advokasi dan fasilitasi kerja sama desa, terutama untuk desa-desa yang berada di daerah perkebunan, daerah pesisir, kita melakukan fasilitasi dan advokasi untuk bisa sama-sama memanfaatkan di daerah-daerah yang bersinggungan dengan daerah tambang tadi, termasuk kita dengan PT Semen Indonesia ini kaitannya dengan upaya bagaimana untuk mendorong pemanfaatan kegiatan ekonomi yang ada di desa.

Juga kerja sama dengan ASEAN melalui SOMRDPE (*Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication*) juga melakukan sosialisasi dan pertemuan-pertemuan bagaimana penanganan kemiskinan di wilayah ASEAN.

Kemudian pemanfaatan dari kegiatan kebencanaan karena menurut IRBI 53 ribu desa di Indonesia ini adalah berpotensi bencana, sehingga kami juga panduan sekaligus sebagai sosialisasi agar bisa memiliki ketanggapan terhadap kebencanaan tersebut.

Demikian juga, untuk fasilitasi desa peduli iklim dan yang terakhir adalah Badan Pengendalian Penggunaan Dana Desa, dari Pagu 3,43 miliar dilakukan beberapa kegiatan selain kita menyusun perumusan kebijakan dalam peraturan Menteri Desa yang kemudian bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pengendalian, dalam forum ini juga kami laporkan bahwa penyerapan dana desa pada tahun 2022 mencapai 99,86%. Jadi, pada kondisi akhir per tanggal 31 Desember tahun 2022 kemarin.

Berikutnya,

Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Kita juga dalam bisnis proses bagaimana perencanaan ini memberikan sebuah arah, maka di data pencatatan data ini juga menyusun dokumen terkait dengan perencanaan agar program dan kegiatan ini selaras dengan...baik itu yang menjadi kebijakan di Kementerian maupun terkait dengan program-program nasional Kementerian/Lembaga terkait, sehingga menghasilkan 4 dokumen sebagai acuan di dalam rangka penyusunan perencanaan dan selebihnya adalah dukungan manajemen baik itu dalam bentuk gaji, tunjangan operasional, maupun kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang perbaikan kinerja secara kelembagaan di internal.

Kami laporkan juga bahwa, di tahun 2022 memang ada berapa kendala antara lain dengan adanya *automatic adjustment* itu yang berlangsung sampai 4 kali yang ada di PDP ini tentu perlu penyesuaian dan *alhamdulillah* kendala tersebut kami bisa kami atasi melalui koordinasi termasuk strategi-strategi misalnya dalam rangka penyaluran bantuan kami melakukan melalui *zoom meeting*, melakukan kemudian kunjungan lapangan maupun berbagai upaya dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan tersebut.

Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Selanjutnya, kami melaporkan terkait dengan Pagu pada tahun 2023. Kami mendapatkan Pagu Anggaran yakni Rp234.356.528.000,- terdiri dari rupiah murninya 186,4, pinjaman luar negerinya 40 miliar, untuk kegiatan P3PD, yakni percepatan penguatan pemerintahan dan pembangunan desa dan hibah luar negeri untuk kegiatan fasilitas *stunting* 7,8 miliar, terdistribusi kepada enam Unit Kerja Eselon II, di direktorat Sarpras ini 98,2 miliar, di pengembangan sosial budaya dan lingkungan 59,2, di advokasi kerja sama 7,5 dan di fasilitas dana desa 5,5. Sedangkan, di perencanaan teknis PDP 4 miliar dan sekretariat 59,8 ini cukup agak besar karena memang di dalamnya ada gaji.

Namun perlu kami laporkan, Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota.

Bahwa, setelah DIPA diterbitkan kemudian di awal Januari kami juga mendapatkan *automatic adjustment* kurang lebih 29,7 miliar atau 12,71%, ini terdistribusi di setiap unit kerja Eselon II.

Adapun program dan kegiatan pada tahun 2023 dari anggaran tadi yang pertama pengembangan objek wisata desa, ini ada target kami 152 desa dengan Pagu 68,9. Kemudian, peningkatan kapasitas pelaku wisata, namun ini karena ada *automatic adjustment* kami harus memilih pada prioritas-prioritas kegiatan maka untuk kegiatan ini sementara kami lakukan blokir.

Kemudian, pembangunan revitalisasi jalan yang semula 6,7 kita Pagu Efektif kita tinggal 3,5 terus pengembangan kawasan potensi pariwisata terpadu di kawasan pedesaan ini juga kena blokir, sehingga hanya tinggal 425

dan pengembangan amenitas wisata dari 4,5 tinggal 1,8. Sehingga dari target 8 desa sementara kami lakukan di dua desa, karena menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ada dan pengembangan revitalisasi pasar yang awalnya 20 desa karena juga ada kena *automatic adjustment* kita Pagu Efektif tinggal pada posisi di 5 desa dengan anggaran 2,6 miliar.

Untuk sarana air bersih ada di ini kita blokir dan PHLN karena ini juga kaitannya dengan *stunting* ini dari Pagu 11,384 Pagu Efektif tinggal 10,38 untuk target tetap di posisi di 360 desa. Untuk kegiatannya adalah penguatan kapasitas dalam kapasitas konvergensi *stunting* termasuk kegiatan dalamnya ada desa peduli kesehatan.

Kemudian untuk akuntabilitas sosial ini karena *multiyears* dari tahun, sejak di tahun 2021, baik itu ada di Kementerian Desa, termasuk di Kementerian Dalam Negeri dan yang lain, yakni kita target dari 320 desa di tahun 2023 ini dengan Pagu 40 miliar.

Kemudian untuk kawasan pedesaan yang kena *automatic adjustment*, terus sarpras pendukung pangan juga demikian, termasuk untuk peralatan sarana produksi di daerah tertinggal kena *automatic adjustment*.

Berikutnya,

Ketua, Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Untuk kegiatan kebencanaan dari ini juga kena *automatic adjustment* tinggal dari 1 miliar tinggal 730 untuk target 3 desa, terutama untuk mendorong keberlanjutan dari termasuk sarana air bersih bagi masyarakat.

Kemudian, pengembangan desa peduli pendidikan ini masih menjadi bagian juga dari peran P4GN, yakni ditarget di 6 desa. Kemudian, untuk peningkatan kapasitas aparatur di desa bencana ini kena *automatic adjustment*.

Di kegiatan advokasi dan pengembangan kerja sama desa dan pedesaan dengan Pagu 7,5 miliar tadi, kita targetkan di 250 desa dengan bentuk kegiatan melalui advokasi terhadap desa-desa yang melakukan kerja sama dengan pihak, termasuk fasilitasi dari RDPE di mana bahwa tahun 2023 ini Indonesia sebagai keketuaan di ASEAN dan Kementerian Desa menjadi bagian dari fasilitasi di SIUM RDPE salah satunya adalah mengawal *asean village networking* serta penilaian status desa dan kawasan pedesaan. Selibuhnya adalah dalam dukungan manajemen di PDP dan pengendalian penggunaan dana desa.

Kiranya, demikian pokok-pokok yang dapat kami laporkan Pimpinan dan Bapak-Ibu semuanya, mohon masukan saran penyempurnaan sekaligus nanti kiranya untuk hal yang perlu kami perbaiki ke depan.

Terima kasih, kurang lebih mohon maaf, saya akhiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Dirjen.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Dirjen.

DIRJEN PEID-DTT KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (Ir. HARLINA SULISTYORINI, M.Si.):

Terima kasih, Bapak.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang terhormat Bapak Pimpinan sidang, Bapak Muhammad Iqbal, dan
Seluruh jajaran Anggota Komisi V yang kami hormati,
Kolega kami para Dirjen, dan
Seluruh JPT Pratama dari Kementerian Desa, dan
Seluruh hadirin yang berbahagia,**

Izinkan, kami dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melaporkan terkait dengan Capaian Kinerja kami di tahun 2022 dan Rencana Kerja kami di tahun 2023.

Yang pertama, kami izin melaporkan adalah terkait dengan komposisi anggaran, Bapak dan Ibu semua. Jadi, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa pada tahun 2022 total anggaran kami adalah Rp311.235.151.000,- ini terbagi dalam komposisi sebagai belanja modal 126 juta, kemudian belanja barang 281,3 miliar atau 90,39% dan belanja pegawai 9,57% atau 29,7 miliar.

Kemudian terkait pengelola, kami untuk kegiatan di tahun 2022 berupa dekon atau kita di satker daerah dan di pusat. Di daerah ini ada 5 provinsi yang mengelola, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.

Terkait dari sumber dana kami dari 311 miliar untuk rupiah murni kita ada 102...188 miliar di pusat, kemudian yang di terkait dengan PHLN-nya untuk pusat 77,9 miliar, sedangkan untuk dekon ini anggarannya 122 miliar itu dari pinjaman luar negeri dan dari rupiah murni sebagai dukungan manajemen 753.480.000,-

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Terkait dengan realisasi penyerapan anggaran di tahun 2022 untuk di Satker Pusat di Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi kami mencapai di angka 82,7%. Di sini terbagi untuk unit Seditjen ini realisasinya 99,19%, kemudian di unit Direktorat Perencanaan ini 99,8%, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi 9,82, kemudian Direktorat Layanan Investasi Desa 99,96%, Direktorat Pengembangan Produk Unggulan 61,7% dan Direktorat Promosi dan Pemasaran 99,74%.

Sedangkan untuk Satker Dekon ini di Papua Barat ini 68,67%, kemudian untuk Satker Papua 70,48%, NTT 79,42%, kemudian Maluku 71,64% dan di Maluku Utara 72,1% sehingga total realisasi kami di tahun ini, di tahun 2022 kemarin adalah 77,83%.

Anggaran tadi Bapak dan Ibu yang saya hormati adalah di antaranya untuk mencapai sasaran strategis yang menjadi IKU kami, yakni untuk tahun 2022 ini, kami harus mencapai target jumlah BUMDes yang berkembang itu 7.500 dan kita sudah mencapai di angka 7.662. Kemudian, untuk jumlah BUMDes maju ini ada 1.150 dan kita sudah mencapai 1.208, sedangkan untuk BUMDes bersama ini ada targetnya 245 kita mencapai 331 dan untuk BUMDes bersama maju target 155 kita mencapai 373.

Secara detail, secara rinci, izin melaporkan untuk Direktorat Perencanaan karena memang kami memerlukan untuk dokumen atau rekomendasi kebijakan, kita mengeluarkan satu dokumen perencanaan dan sudah terealisasi atau 100%.

Kemudian untuk bantuan penguatan BUMDes, target kami 500 BUMDes dan hanya satu yang tidak bisa terealisasi sehingga capaian kami adalah untuk BUMDes ini 99,88%, sedangkan untuk BUMDes bersama targetnya 72% dan semuanya terealisasi, ini mencakup di kawasan transmigrasi 20, di daerah tertinggal 20 dan di kawasan pedesaan 32 BUMDes bersama.

Kemudian, terkait untuk bantuan pengembangan kewirausahaan kita ada empat paket dan semuanya terealisasi, ini mencakup kegiatan untuk pengolahan lada putih di Belitung, kemudian pengolahan kopi di Lombok Utara, kemudian pengolahan padi di Buol.

Berikutnya, izin melaporkan terkait dengan kegiatan TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu), ini yang dilakukan atau melalui dana PHLN di 5 provinsi, ini ada di 25 kabupaten dan untuk bantuan demplot ini ada targetnya 250 kelompok penerima bantuan dan sampai akhir kemarin kita tidak...tidak optimal karena *coaching clinic* mencapai 80%, kemudian untuk bantuan demplotnya 58,8%, sedangkan untuk perhutanan sosial atau Prokades, penguatan Prokades ini ada dua unit dan semuanya terealisasi di Belitung Timur dan Lumajang.

Untuk Direktorat Promosi kita ada penyusunan atau pengembangan jejaring dan kerja sama dan kami sudah menyusun delapam kesepakatan, baik

dengan lintas swasta maupun lintas *stakeholder* terkait dan ini 100% terealisasi.

Kemudian untuk promosi kita juga melakukan kerja sama yang targetnya 11 promosi, karena kami melakukan kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak, sehingga kita bisa meningkatkan 12 promosi dari target sehingga capaiannya 110%.

Izin Bapak dan Ibu, melaporkan yang hal-hal yang kami lakukan terkait dengan kegiatan strategis di Direktorat Jenderal PEI selama tahun 2022. Kami bekerja sama dengan ISSF itu melaksanakan CSR *award*, ini adalah konsep kegiatan CSR perusahaan. Utamanya perusahaan swasta yang mengembangkan potensi-potensi unggulan di desa dan ini sudah bekerjasama dan mendapatkan penghargaan dari kita ada 63 BUMN dan swasta, kemudian juga ada satu yayasan, serta 4 perorangan.

Kemudian, kami juga melaksanakan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, untuk tahun 2022 kemarin kita mendapatkan amanah atau tanggung jawab di Maluku Utara dan pada saat acara yang dimulai bulan Agustus kemudian *harvesting*-nya di bulan Oktober sudah ada 149.122 UMKM yang masuk di-*boarding* atau di *e-commerce* dan dengan tenaga kerja yang terserap 1.000, 170.600 orang. Kemudian, untuk jumlah penjualan di dalam e-katalog kemarin sudah mencapai 14 etalase dan 1.162 produk dengan nilai penjualan 20 miliar, 20 miliar 965 Juta.

Kemudian kami juga menggiatkan kerja sama dengan Astra melalui desa sejahtera Astra dan ini untuk tahun 2022 kita sudah melakukan pendampingan di 130 desa di 34 kabupaten UAMG di antaranya di 9 kabupaten sudah bisa melakukan ekspor.

Dengan BRI kita melakukan kerja sama melalui desa brilian yang dimulai tahun 2022 dan sampai sekarang sudah mendampingi atau mengawal di 2.180 desa, 82 desa, dan di puncak acara kemarin sudah ditetapkan 15 desa yang masuk kategori desa terbaik.

Izin Bapak dan Ibu,

Terkait dengan registrasi atau verifikasi pendaftaran BUMDes yang menjadi tanggung jawab kami di Dirjen PEI, kami izin melaporkan bahwa total untuk pendaftaran BUMDes ini sudah mencapai 47.583 BUMDes . Yang terverifikasi nama ini adalah 28.591 dan yang sudah berbadan hukum sampai saat ini adalah 12.372 BUMDes . Sedangkan BUMDes bersama ini totalnya sudah masuk di data kami 2.717, yang diproses pendaftaran nama 2.441 dan sudah terverifikasi badan hukum 174, sedangkan BUMDes bersama LKD ini totalnya adalah 1.900 dan proses pendaftaran nama 947 dan terverifikasi untuk badan hukum 781.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Terkait dengan poin kedua, yang izin kami melaporkan adalah terkait dengan rencana kerja untuk tahun 2023.

Direktorat Jenderal PEI pada tahun 2023 mendapatkan amanah untuk menuntaskan atau mengembangkan BUMDes berkembang ini menjadi 9.000 BUMDes, kemudian untuk yang maju 1.450 BUMDes, sedangkan untuk BUMDes bersama kita mendapatkan target untuk BUMDes bersama berkembang 270 dan untuk BUMDes...BUMDes Maha Maju ini 175.

Total anggaran yang menjadi, yang mendapatkan, yang kami peroleh adalah 230.459.248.000, di sini ada PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) dan rupiah murni. Untuk rupiah murninya kami Rp159.381.068.000,- sedangkan pinjamannya adalah 66 miliar koma 78 juta dan hibahnya adalah 5 miliar.

Secara detail penggunaannya dan ini juga kami ingin melaporkan terkait dengan *automatic adjustment* yang sudah kami terima. Dari Pagu Awal Direktorat Jenderal 230 kita mendapatkan *automatic adjustment* 20,9 miliar dan ini terdistribusi mulai dari Sesditjen kita dari 53,2 miliar mendapatkan AA 1,7 sehingga Pagu akhir adalah 51,5 miliar. Kemudian, Direktorat Perencanaan Teknis dari 4 miliar mendapatkan AA 1,9 miliar. Sehingga, Pagunya 2,1, kemudian Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pagu Efektifnya menjadi 78,2. Kemudian, untuk pelayanan investasi dari 7 miliar mendapatkan blokir atau AA 4,5 miliar dan Pagu akhir efektif 2,5 miliar, sedangkan untuk pengembangan produk unggulan 75 miliar mendapatkan blokir AA 2,9 dengan total Pagu Efektif 72 dan terakhir Direktorat Promosi 6,5 miliar dan mendapatkan blokir AA 3,5 dan Pagu Efektif 3 miliar.

Anggaran tadi akan kami manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang pertama adalah terkait dengan NSPK dari Direktorat Perencanaan Teknis, ini juga ada kita akan melakukan kesepakatan, dokumen kesepakatan lintas sektor dan pemda.

Kemudian, untuk Direktorat Pengembangan Kelembagaan ini terkait dengan penguatan BUMDes dan badan usaha bersama tidak ada kita lakukan pemotongan atau blokir AA, sehingga kami, target kami nantinya 840 BUMDes penguatannya, kemudian untuk BUMDes bersama 68 kita bisa lakukan secara optimal.

Kemudian, terkait dengan BUMDes untuk peternakan kita mendapatkan *block list* sehingga belum kita bisa lakukan, demikian juga untuk kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Untuk Direktorat Pelayanan Investasi, beberapa kegiatan kita mendapatkan blokir mulai dari terkait dengan koordinasi untuk akses pemodal, kemudian penyusunan informasi potensi investasi, perizinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan...fasilitasi pengembangan kewirausahaan kita ada pemotongan-pemotongan untuk mengakomodir blokir AA yang menjadi target atau yang sudah diamanahkan kepada Direktorat Jenderal PEI.

Sedangkan, untuk Direktorat Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan, ini terkait dengan kegiatan transformasi ekonomi kampung terpadu dan perhutanan sosial kita juga mendapatkan blokir AA di kegiatan untuk peningkatan nilai tambah Prokades, kemudian juga di prasarana Prokades dan pembiayaan untuk pengembangan produk unggulan, sedangkan untuk Direktorat Promosi kami juga ada beberapa kegiatan yang didalamnya juga kena blokir AA di antaranya adalah terkait dengan koordinasi, promosi, kemudian pengembangan desa ekspor, stimulan, sarana dan prasarananya maupun promosi untuk dinas PPI yang tahun ini rencananya akan dilaksanakan di Sulawesi Tenggara di Kendari pada bulan Agustus.

Demikian Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang bisa kami laporkan, kami mohon masukkan dan arahan lebih lanjut.

Terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Bu Dirjen.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Pak Dirjen.

DIRJEN PPKT KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (Ir. RAJUMBER PRIHATIN, M.Si):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Bapak-Ibu JPT Madya dan Pratama,
Bapak-Ibu yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat hari ini, ya,**

Pada kesempatan ini kami dari Direktur Jenderal Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda rapat kita pada hari ini yaitu, yang pertama yaitu pokok bahasan mengenai Evaluasi APBN Tahun Anggaran 2022 dan rencana program dan Anggaran Tahun 2023.

Untuk yang pertama yaitu terkait dengan evaluasi APBN Tahun Anggaran 2022, kami sampaikan informasi bahwa kinerja serapan anggaran tahun 2022, Bapak-Ibu sekalian, untuk realisasi keuangan tercapai sebesar 98,63% atau sebesar Rp277.930.375.874,- dari Pagu Anggaran ya berdasarkan revisi akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp281.804.286.000,-

Untuk realisasi pusat, ini mencapai sebesar 99,77% atau sebesar Rp108.386.550.000,- kemudian untuk realisasi daerah ini sebesar 97,91% atau sebesar Rp169.543.825.000,-

Berikutnya,

Bapak-Ibu sekalian,

Kami sampaikan distribusi Pagu Anggaran Tahun 2022 berdasarkan jenis belanja. Untuk belanja modal, ini sebesar 0,52%, kemudian belanja pegawai sebesar 13,59% dan belanja barang sebesar 85,89% dari total belanja sebesar Rp281.804.286.000,-

Sedangkan untuk komposisi pembagian anggaran pusat dan daerah, anggaran daerah sebesar 61,45% atau sebesar Rp173.165.180.000,- sedangkan untuk komposisi anggaran pusat sebesar 38,55% atau sebesar Rp108.639.000.000,- untuk anggaran ini, ini tersebar di 71 satker daerah dan satu satker pusat.

Kemudian, yang berikutnya yaitu realisasi anggaran berdasarkan jenis program, ya, Bapak-Ibu sekalian dan berdasarkan rincian untuk per unit kerja Eselon II.

Berdasarkan program dukungan manajemen, persentase kegiatannya adalah sebesar 99,59%, total realisasinya sebesar Rp82.163.873.582,- untuk program teknis, total realisasinya adalah Rp195.766.502.292,- atau sebesar 98,23%.

Nah, masing-masing direktorat kalau kita lihat, di sini, untuk direktorat perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi. Persentasenya mencapai realisasi sebesar 99,97%. Untuk Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi mencapai sebesar 98,41%, kemudian Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk Kawasan Transmigrasi mencapai sebesar 95,66% dan Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, ini mencapai sebesar 98,48%. Sedangkan, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi mencapai 99,51%.

Berikutnya, kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan realisasi *output* kegiatan di tahun 2022.

Kalau kita lihat di sini bahwa *output* kegiatan baik yang merupakan prioritas nasional maupun prioritas kementerian ini sebagian besar mencapai target yang telah ditetapkan yaitu, yang pertama pembangunan peningkatan rehab jembatan atau (*suara kurang jelas*) ini dari target 729 meter, realisasinya mencapai 741 meter.

Kemudian untuk jalan yang dibangun atau ditingkatkan di kawasan transmigrasi target 61,54 kilometer, ini tercapai realisasinya sebesar 61,65 kilometer. Berikutnya fasilitas umum dari target 91 unit, realisasi 91 unit. Kemudian, bantuan kebutuhan pangan transmigran target 925 KK juga

teralisasi sebesar 925 KK. Kemudian, sarana air bersih dan bangunan air, ini target 298 unit, realisasi juga mencapai 298 unit. Kemudian, pengembangan drainase target 29,67 kilometer ini realisasi juga mencapai 29,67 kilometer.

Untuk pembangunan peningkatan rehab sarana perumahan yang dibangun di kawasan transmigrasi, ini target 114 unit, realisasinya juga 114 unit. Kemudian lahan yang dibuka untuk pembangunan kawasan transmigrasi target 109 hektar, realisasinya mencapai 135 hektar.

Kemudian, sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi dengan target 32 unit ini mencapai 32 unit realisasinya. Kemudian, fasilitas pengurusan SKHPL juga target 16 daerah, realisasinya 16 daerah. Kemudian, fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik dari target 4.570 orang realisasi juga mencapai 4.570 orang.

Kemudian, kegiatan untuk rencana perwujudan kawasan transmigrasi dari target penyusunan 7 dokumen, realisasi juga mencapai 100% yaitu sebanyak 7 dokumen, dan yang terakhir adalah penataan persebaran dan penempatan transmigran dari target 571 Kepala Keluarga, realisasinya juga mencapai 100% yaitu 571 Kepala Keluarga.

Berikutnya, kami sampaikan Rencana Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,

Sebagai informasi di sini kami menyampaikan pagu dan realisasi bidang ketransmigrasian mulai tahun 2015 sampai tahun 2023, dalam kurun 7 tahun terakhir.

Kalau kita lihat pagu dan realisasi bidang ketransmigrasian ini tahun 2015 masih memperoleh pagu sebesar 1,7 Triliun, kemudian realisasi sebesar 1,6 Triliun. *Nah*, pagu ini kemudian setiap tahun terus menurun dan terakhir tahun 2022, ini sebesar Rp281.804.286.000,- dengan realisasi Rp277.930.375.874,- dan tahun 2023 ini turun lagi menjadi Rp251.553.559.000,-

Kalau kita lihat rata-rata realisasi anggaran bidang ketransmigrasian dalam kurun tujuh tahun terakhir ini relatif stabil, yaitu di kisaran 94,44% dengan penyerapan tertinggi ini terjadi pada tahun kemarin, yaitu tahun 2022 sebesar 98,63% dan terendah pada tahun 2021 sebesar 89,22%, ini akibat adanya terjadi pemblokiran dan pemulihan ekonomi nasional.

Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian,

Kami sampaikan juga mengenai pagu DIPA tahun 2023 ya, total pagu DIPA kita untuk tahun 2023 sebesar Rp251.553.559.000,- ini terdiri dari dua program sama seperti tahun 2022 yaitu dukungan manajemen dan program teknis. Untuk program dukungan manajemen sebesar 77 miliar 500 Juta

Rupiah, kemudian untuk program teknis sebesar Rp174.053.559.000,- ini tersebar di lima Direktorat, ya, Bapak-Ibu sekalian.

Kemudian berikutnya kami sampaikan terkait dengan Pagu Alokasi Tahun 2023, kalau kita distribusikan berdasarkan per jenis belanja. Jadi, untuk belanja modal ini sebesar 6,42% atau sebesar Rp16.146.639.000,- kemudian belanja pegawai sebesar 15,93% atau Rp40.078.509.000,- kemudian belanja barang 77,65% atau sebesar Rp195.328.411.000,-

Nah, untuk Tahun Anggaran 2023, ini kalau kita lihat komposisi pembagian antara anggaran pusat dan daerah ini komposisi anggaran daerah sebesar 54,79%. Sementara anggaran pusat sebesar 45,21% yang tersebar di satu satker pusat dan 78 satker daerah.

Berikutnya,

Bapak-Ibu sekalian,

Pada Tahun Anggaran 2023 juga kita mendapat *automatic adjustment* sebesar Rp55.716.586.000,- atau sebesar 22,15% dari total pagu Rp251.553.559.000,-

Berikutnya untuk target, target rencana penarikan Kurva S Tahun 2023. Pada akhir tahun 2023, kami menetapkan target sebesar 98,5% Bapak-Ibu sekalian.

Dan, yang terakhir Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V, ini terkait dengan *output* prioritas tahun 2023, hampir sama dengan target sebelumnya yaitu tahun 2022. Untuk sarana perumahan yang dibangun di kawasan transmigrasi, ini kita targetkan sebanyak 200 unit atau sebesar 21,1 miliar, kemudian sarana air bersih di kawasan transmigrasi ini ada 32 unit sebesar 5,3 miliar, fasilitas umum di kawasan transmigrasi sebanyak 37 unit, 11 miliar, kemudian bangunan air di kawasan transmigrasi satu unit, 745 Juta, kemudian jalan di kawasan transmigrasi sepanjang 60,9 kilometer atau sebesar 38,8 miliar dan jembatan di kawasan transmigrasi sepanjang 287 meter atau sebesar 15,6 miliar.

Kemudian, drainase di kawasan transmigrasi sepanjang 10 kilometer atau sebesar 3,5 miliar, pengadaan satu pangan sebanyak 859 Kepala Keluarga atau sebesar 11,5 miliar. Kemudian, fasilitasi pengurusan SKHPL ini ada di 13 daerah sebesar 1,8 miliar, kemudian pengadaan sarana produksi 36 unit atau sebesar 7,7 miliar, pengadaan bantuan peralatan pasca panen 11 satuan permukiman atau 1,4 miliar dan fasilitas pengurusan sertifikat hak milik sebanyak 2.489 orang atau sebesar 4,8 miliar.

Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar memang digunakan dalam rangka untuk kegiatan *mandatory* di 64 satuan permukiman bina dan satu SP baru atau kurang lebih 7.264 Kepala Keluarga.

Mungkin itu, Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan mohon masukan, arahan dan saran dan kami akhiri dengan,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Bapak dan Ibu para Dirjen atas paparan dan penjelasan yang telah disampaikan kepada kami dan ini saatnya bagi Anggota untuk bertanya.

Di meja saya ini ada 10 Anggota yang akan bertanya *nih*, Pak Dirjen dan Ibu Dirjen. Yang pertama, saya persilakan Ibu Sri Rahayu, selanjutnya nanti siap-siap Pak Tamanuri. Silakan, Bu.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Makasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan,
Anggota Komisi V yang dihormati,
Pak Dirjen,
Pak Kepala Badan,
Ibu atau Dirjen ya,
Pak Dirjen,
Bu Dirjen, dan
Selanjutnya yang saya hormati, dan
Seluruh jajaran,**

Saya untuk semua, saya tidak banyak pertanyaan hari ini. Yang pertama, Pak, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, ini saya selalu apa ya, memberikan perhatian terhadap kawasan transmigrasi atau program-program transmigrasi.

Apa yang disampaikan realisasi pada halaman 7 yang Bapak sampaikan, itu dari tahun ke tahun kayaknya ada beberapa hal yang sama, artinya ada program lanjutan, program-program yang memang setiap tahun harus ada dan ada yang tidak ada.

Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin juga, saya mohon dengan hormat dan sangat minta *roadmap*-nya yang terhitung mulai dari tahun 2020 tentunya sampai dengan tahun 2025, *roadmap*-nya seperti apa dan yang sudah dicapai apa sehingga, ya, pada lima tahun ke depan itu pada tahun 2025 itu Bapak-Ibu sekalian akan mencapai berapa. *Nah*, dengan demikian kita *tau* mana yang program yang sudah terselesaikan mana yang belum, ini tidak hanya untuk Bapak, tetapi untuk semuanya. Tidak hanya untuk transmigrasi tetapi untuk semuanya.

Kenapa demikian, karena ada hal-hal yang memang kita harus lihat mana yang satu tahun selesai. *Nah*, kayak misalnya BUMDes, BUMDes ini berapa *sih* jumlahnya yang ada di Indonesia dan harus ada di Indonesia ini berapa. Yang bagus yang sudah berbadan hukum tadi sampaikan berapa? Yang belum berapa? Yang mana yang mau digarap duluan? Karena tidak mungkin semuanya akan digarap bareng-bareng *gitu* dengan anggaran yang jumlahnya tidak cukup untuk semuanya.

Meskipun mungkin bantuannya melalui baik itu melalui aspirasi maupun langsung dari Kemendes dari jumlah yang ada kalau kita lihat desanya saja sekitar 74.961 itu kalau semuanya diharapkan punya BUMDes artinya harus menganggarkan sejumlah itu, tetapi tadi ada kriteria mana yang sudah bagus, mana yang sudah berbadan hukum, mana yang belum dan tentu kami ingin *tau* secara persis apa yang dikatakan bahwa BUMDes itu sudah berhasil menurut indikator atau indikasi ataupun standar ataupun *spek* dari Ibu...dari Ibu, Bapak semuanya yang punya program itu. Sehingga, kita tahu secara persis kalau misalkan memperjuangkan itu anggaran misalnya ini *loh* yang harus ditekankan supaya ini segera bisa di-*push* atau dikembangkan.

Karena kita secara jujur harus kita akui bahwa semua anggaran yang disodorkan kepada Komisi V ini sama sekali tidak ada perubahan begitu. Ya *oke* adanya itu ya, dari pagu yang disiapkan itu dari Kementerian Keuangan diberikan sekian *oke*, programnya dibagi-bagi-bagi ini, ya. Tetapi tentu kami berharap bahwa apa yang diprogramkan anggaran yang diberikan ini mampu untuk mengungkit maupun mengembangkan apa yang Bapak-Ibu rencanakan ke depan, sehingga ini bukan sesuatu yang sekedar *as usual* yang programnya ini dan itu yang itu harus ada sesuai dengan apa yang ada di benak atau kepala Bapak-Ibu semuanya.

Kemudian, saya ingin menanyakan terkait dengan evaluasi ya dari kalau *nggak* salah. Itu ada yang...apa namanya belum mencapai tetapi prosentasenya saya *ndak ngerti* tadi *itung-itungannya* seperti apa itu hasil evaluasi hitungannya dari tadi baru ada yang di bawah 100% tetapi kemudian rata-ratanya 100% lebih, mohon saya diberikan penjelasan.

Kemudian saya ingin bertanya terkait dengan transmigrasi. Saya ingin diberikan penjelasan Pak, dari tahun 2023 Bapak sudah membuat untuk transmigrasi ini terkait dengan rehabilitasi Gereja SP 2 Senggi Kirom Papua. Saya tidak mempersoalkan pembangunannya, tentu saja saya senang ada...ada pembangunan ini. Yang ingin saya tanyakan, itu sama-sama di Kirom, sama-sama di SP 2, ini kan apa namanya transmigrasi ya, Pak, ini ya tapi ada rehabilitasi Gereja SP2 Senggi ada dua unit, kemudian rehabilitasi Gereja SP2 Senggi ada 6 unit yang anggarannya satunya 117 juta, satunya 359 juta. Ini saya mohon diberi penjelasan ini, ini halaman, penjelasan halaman lembar kedua terakhir, ini yang tebal ini, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Kemudian juga termasuk di dalamnya itu ada, saya juga minta penjelasan, pengadaan sarana produksi lahan pekarangan lanjutan itu ada 17 KK di sana. Kemudian, sarana produksinya juga untuk 17 KK, ini saya mohon

penjelasan ini anggarannya sendiri-sendiri hanya 17 KK, ada 17 KK tetapi anggarannya cukup besar menurut saya jika dibandingkan dengan yang lainnya.

Kemudian lagi, sebenarnya kalau meneliti satu-satu ini juga banyak tanda tanya. Masih di Papua, khususnya di Merauke pada nomor pada...apa ini nomornya 1402 dan 1403 halaman berikutnya. Angkutan beras lokasi *muting* SP12 dan pengadaan catu pangan, saya *ndak ngerti* catu pangan ini apa maksudnya. Tapi, antara angkutan dengan catu pangannya itu hampir sama, sama-sama hanya 17 KK begitu ya, termasuk juga yang lain-lainnya tolong ini dicek apakah memang benar atau *gimana*.

Demikian juga di Teluk Gundam...Wondama ini juga demikian, hanya 15 KK tetapi anggarannya cukup lumayan *gitu* kalau dibandingkan dengan apa ya mungkin saya *ndak ngerti* karena harga-harganya.

Demikian juga untuk transmigrasi Pak, saya mohon dengan hormat dan sangat, saya bukan-bukan *ndak* mau transmigrasi ya, saya *nggak* ingin bahwa ada pemindahan kemiskinan begitu. Di satu sisi misalkan di Jawa karena jumlahnya penduduk banyak, tidak punya sawah, bahkan kadang punya sawah juga, tetapi juga banyak yang dijual karena ingin transmigrasi, tetapi di sana ternyata sebagaimana teman kemarin sampaikan ada tanah yang belum...yang sudah posisi di sana sebagai transmigran tetapi hak tanahnya belum jelas, kadang-kadang mereka hanya diberi tempat kemudian dibiarkan begitu saja lahan-lahannya juga kering, kemudian lahan-lahannya juga untuk ditanami dipaksakan untuk ditanami padi dan seterusnya itu mohon menjadi evaluasi dari Bapak-Ibu sekalian.

Yang ingin saya sampaikan adalah ada tempat transmigrasi yang sudah berkembang, ada yang belum berkembang, ada yang baru dan akan dilakukan transmigrasi. Mohon juga ini Bu, Pak, perencanaan dari Bapak *roadmap* selama lima tahun itu seperti apa sehingga ke depan ini apakah masih perlukah kita transmigrasi. Karena saya-saya lihat bahwa masih ada sosialisasi tentang transmigrasi *gitu*.

Nah, oleh karena itu, kalau kita hanya memindahkan kemiskinan ya tidak perlulah transmigrasi. Maksud saya yang sudah ini benar-bener diperhatikan, kemudian *roadmap* pembangunannya betul-betul apa namanya tertata-terstruktur sehingga di tempatnya di sana menjadi keluarga yang memang betul-betul dientaskan dari kemiskinan, dari sebelumnya.

Karena menurut pengalaman di daerah saya, di dapil saya, orangnya transmigrasi, kemudian semua barang-barangnya asetnya sudah dijual, di sana...di sana *nggak* jelas, kemudian setelah pulang tidak punya apa-apa lagi, hal itu jangan sampai terjadi ada, Pak, di tempat saya di kabupaten, di kabupaten Kediri kalau *nggak* salah.

Nah, oleh karena itu ini menjadi perhatian kita, karena kan mereka punya harapan yang tinggi untuk transmigrasi. Karena dianggap di sana tanahnya masih luas ya, seperti saya pernah datang ke Kaltara itu, di Bulungan,

di SP berapa itu, itu kalau menuju ke situ harus naik...naik *speed* yang jauh begitu dan tidak ada air kecuali sungai dan oleh karena itu ini perlu menjadi perhatian, jangan sampai hal ini, apa terulang kembali dari hal-hal pengalaman-pengalaman yang tidak baik.

Kemudian demikian juga untuk pengembangan ekonomi. Saya kadang-kadang bingung, antara apa, contohnya misalnya Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Pengembangan Ekonomi. Kemudian pembangunan desa dan pedesaan, ini sebenarnya kan tidak ada sesuatu yang berbeda jauh begitu meskipun mungkin, *oh* ya ini fokusnya ekonomi, ini fokusnya fisik. Tapi yang namanya pembangunan itu kan tidak hanya fisik tetapi pembangunan yang sifatnya adalah menyeluruh, tidak hanya fisiknya saja sarana-prasarananya saja tetapi juga pembangunan baik itu kesehatan pembangunan ekonomi dan seterusnya.

Oleh karena itu, sejauh mana keterpaduan program-program Bapak yang bukan-bukan sendiri ya, maksudnya, keterpaduan antara program dari Direktorat Bapak dan Direktorat...apa namanya, pengembangan ekonomi dan investasi. Kenapa ini penting, karena supaya tidak tumpang tindih.

Karena sekali lagi kita tidak mungkin membaca satu per satu yang seperti ini, ini *aja nggak* mungkin kita baca satu per satu begitu. Kita percaya sepenuhnya kepada Bapak-Ibu sekalian. Oleh karena itu kepercayaan ini tentu harus dipegang teguh, jangan sampai "*halah* paling Anggota Dewan Komisi V tidak akan baca satu persatu, *wes tak apusi wae*, yang penting ada...apa namanya program-program yang kami tulis", tentu kami harapannya tidak demikian.

Oleh karena itu untuk semuanya saya mohon dengan hormat *roadmap* karena kita *taunya* global, *taunya* kita tidak detail, tolong ini diberikan kepada kami semua.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Tamanuri, kemudian siap-siap, Bapak Hamid Noor Yasin setelahnya.

F – P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang dihormati, Pak Pimpinan beserta Anggota Dewan,
Yang dibanggakan, Bapak-Bapak para Dirjen dan Ibu, serta
Rekan-rekan Eselon II, dan**

Hadirin yang berbahagia,

Mungkin saya tidak bisa menyampaikan ini secara *rut*...secara runut ya, tapi mana yang kena *aja* nanti, kalau kena Ibu, ya, Ibu jawab, kalau kena Bapak, Bapak jawablah.

Saya ini pengalaman Pak, saya ini tahun '79 *udah* jadi camat waktu itu. Jadi, ada namanya translog di Lampung itu tahun '82 saya lebih kurang menerima 15 ribu KK, kemudian Lampung ini spesifik *nih*. Lampung ini dimulai dengan kolonisasi tahun 1904. Jadi, ada macam-macam transmigrasi Gunung Agung segala macamnya.

Nah, dari pengalaman ini, Pak, banyak sekali masalah-masalah yang kita temukan di lapangan, terutama yang sangat berlarut-larut itu, ini mungkin *nggak* kena sama Bapak-Ibu Dirjen yang hadir ini, mengenai masalah kepastian hak mereka, Pak, tanah mereka mungkin yang kemarin ini, tapi perlu, Bapak, ketahuilah yang sudah puluhan tahun *nggak* beres-beres, yang sertifikatnya itu di situ itu Tamanuri di sini, tapi sebenarnya yang di sini itu ada si Abdul, dia sudah nunggu di situ, di tanah itu, tapi bukan...bukan nama dia sebetulnya yang hadir di situ, ini sampai sekarang ini.

Oleh karena itu, saya usulkan walaupun bukan kewenangan Bapak-Bapak sekalian, supaya ini kalau Bapak-Bapak rapat di kementerian itu yang utama yang pertama kali kalau kita mengadakan transmigrasi adalah hak milik hak tanah mereka, selesaikan dulu, bereskan. Kan kita *udah tau* itu, 100 orang, 100 keluarga di Pacul Gundul kena semua, *nah* jadi kita sudah tetapkan di mana sebenarnya tempat dia dan sertifikatnya yang betul-betul cocok. Kalau si A di sudut situ dia tempatnya di sudut situ, jangan A sudut itu tapi tempatnya dia di sudut sini, *nah* itu.

Kenapa demikian, karena kasihan Pak. Sebagaimana tadi Bu Sri *ngomong* kasihan, jangan sampai kelihatannya memindahkan kesusahan yang harapan begitu besar dari Pulau Jawa ini terbang ke luar Pulau Jawa dengan harapan atau untuk berkembang, sampai situ bertahun-tahun tidak berkembang sehingga tanah-tanah mereka, hak milik yang ada mereka dijual kembali mereka kembali ke kampung halaman, kampung halaman sudah tidak ada tanah lagi, *nah* ini. Jadi, ini tidak tidak membangun, tidak membangun masyarakat kita, justru menyusahakan masyarakat kita.

Kemudian, dari anggaran yang ada ini sekarang ini, saya baca bahwa semuanya kan sampai sekarang ini, yang rencana tahun 2023, itu semuanya di bawah yang sudah tahun 2022 anggaran kita.

Nah, ini harapan saya adalah karena banyaknya program-program baik yang disampaikan...yang dikelola oleh Bapak-Bapak sendiri ataupun yang juga dibantu oleh program aspirasi masyarakat Anggota Dewan, ini terlalu banyak Pak, terlalu banyak judulnya. Jadi, duit 1 miliar itu 5 judul, persis kayak kita *ngebuang* sebutir apa itu pasir di tengah laut *nggak* kelihatan sama sekali.

Oleh karena itu, saya menganjurkan coba kita bentuklah di dalam satu, di dalam satu unit transmigrasi itu. Andaikata KUPT sekian 5, 6, 7, 8 KUPT-nya, kita tunjuk satu UPT, yang ini kita bina, jadikan UPT atau desa binaan ini. Jadi, semuanya bangunnya itu kita tumpahkan dulu di sini, jadi kelihatan lima tahun Bapak-Bapak bekerja di Kementerian Desa Tertinggal ini, transmigrasi ini lima tahun kelihatan *oh* itu hasilnya. Kalau sekarang ini *nggak* ada kelihatan Pak, *nggak* ada sama sekali kelihatan hasilnya.

Bukan-bukan berarti duitnya hilang begitu saja bukan, ada duitnya, tapi karena kecil-kecil ada yang bangunan hanya 300 meter, ada yang hanya bandesnya sekian, wisatanya sekian, segala macam, pasar desanya. Jadi, terlalu banyak judul benderanya itu sehingga *nggak* kelihatan.

Nah, upaya kita adalah kita bentuk, bila proyek satu unit dari KUPT itu kita bentuk satu unit desa yang kita bina situ. Kemudian, tentunya agak payah tapi kita upayakan, bahwa ini semua kementerian itu ada di situ, Kementerian PU ada, Kementerian Kesehatan ada, Kementerian Pendidikan ada, ya mereka-mereka inilah kalau dia untuk sekolahnya kita *guide* Menteri Pendidikan dia yang ngebangun, jangan Bapak yang bangun, kalau untuk jalan-jalannya ya, Kementerian PUPR itu yang kita minta supaya dia yang bangun, jangan Bapak yang bangun.

Kalau Bapak punya dana sekian, 3 triliun lebih ini, untuk membangun jembatan Pak, *nggak* cukup Pak, untuk membangun jalan sekian kilometer *nggak* cukup Pak, tapi kalau bapak *guide*, Pak Basuki membangun setidaknya-pengerasan jalan atau *spal*, setidaknya bikin apa seperti PANSIMAS segala macam itu ini mempunyai arti yang sangat-sangat baik, soalnya pembinaan transmigrasi bukan waktu yang hanya 4-5 tahun, Pak, pembinaan transmigrasi saya sudah alami tahun '82 saya terima transmigrasi baru sekarang berkembang kelihatan, baru kelihatan tanda-tanda kehidupannya sekarang.

Coba bayangkan '82 sekarang 2022, jadi berapa itu, 60 tahun ya, *eh* 40 tahun, 40 tahun barusan kelihatan tanda-tanda kehidupan, Pak. Belum dia hidup bukan.

Nah, jadi pembinaan ini musti memerlukan dada yang lapang, memerlukan satu ketabahan, memerlukan satu kesabaran. *Nah*, jadi bukan seperti Lembaga ataupun Kementerian yang lain, begitu tanam kelihatan, membangun jalan tol kelihatan, ini bukan, karena membangun manusia, manusia yang tadinya tempatnya di Sidoarjo situ, dibawa ke Papua situ ya *nggak* sama mesti lama untuk apa penyesuaian-penylesaiannya.

Nah oleh karena itu, beberapa hal tadi yang saya sudah sampaikan mohon perhatian Bapak menjadi catatan Bapak, apa dia kena dengan tempat Ibu Dirjen dan Pak Dirjen ini atau tidak *monggo* aja lah silakan, tapi ini semua dari pengalaman, Pak, betul-betul masukan dari pengalaman. Jadi mudah-mudahan yang akan datang itu walaupun kita tinggal dua tahun lagi ya, kalau Bapak-Bapak jadi lagi, ya ada manfaatnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya, saya persilakan Bapak Hamid Noor Yasin dan siap-siap Bapak Ishak Mekki setelahnya.

F – PKS (Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan, Pak Iqbal.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya,

**Yang kami hormati Pimpinan sidang, dan
Segenap Anggota Komisi V,
Yang kami hormati Pak Dirjen, Bu Dirjen, Kepala Badan, dan segenap
jajaran eksekutif,
Bapak-Ibu sekalian yang kami muliakan,**

Terima kasih atas paparannya Dirjen PDP, PEI, PPDT, dan PPKT, Transmigrasi, yang sudah kita dipaparkan untuk kita semuanya. Kalau realisasi dan capaian anggaran 2022, semuanya bagus nyaris sempurna 98,63%, 96,84%, 96,82% dan lain-lain. Mudah-mudahan pelaksanaannya itu betul-betul amanah dan penuh dengan tanggung jawab sehingga kita semuanya bisa menghadirkan atau memiliki kontribusi yang positif untuk pembangunan dan tugas-tugas kita semuanya.

Yang kedua Pak Dirjen, Bu Dirjen, ini berkaitan dengan masalah transmigrasi sebetulnya tujuan program transmigrasi ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat tentunya, kemudian peningkatan dan pemerataan pembangunan, kemudian memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Jadi, *spirit* yang utama adalah bagaimana masyarakat transmigran betul-betul bisa sejahtera. Karena ketika para transmigran ini berangkat menuju wilayah trans, dia ini pengorbanannya sudah luar biasa, dia berharap agar kehidupan barunya itu lebih baik daripada kehidupan sebelumnya.

Beliau sudah meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan keluarga tercintanya, masyarakat yang sudah bergaul cukup lama, bersama-sama di kampung halaman semula. Tetapi masih banyak kita jumpai beberapa transmigran yang di tempat trans kehidupan barunya ini mengalami berbagai hal, berbagai persoalan, sehingga terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataannya ketika dia sampai di trans itu.

Salah satu persoalannya adalah masalah percepatan penyelesaian status tanah hak pengelolaan lahan. Ini yang banyak muncul, banyak disorot ini, mohon Pak Dirjen ini betul-betul diperhatikan ya, agar bisa segera menjadi SHM transmigran, ya, jadi menjadi sertifikat hak milik, sehingga para trans itu betul-betul bisa mengelola lahan itu dengan tenang, baik itu untuk pertanian, perkebunan dan untuk masa depan mereka dan keluarganya. Ini salah satu di antara beberapa persoalan, ini untuk transmigrasi.

Kemudian yang kedua Ibu BUMDes , Bu Dirjen. BUMDes ini kalau kita kelola dengan baik, ini, dan bisa eksis serta maju, ini luar biasa dampak perekonomiannya di wilayah tersebut.

Misalnya contoh, BUMDes di situ ada pariwisata yang maju maka sektor riil akan tumbuh di situ, masyarakat sekitar bisa berjualan, ini akan menumbuhkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, maka ini betul-betul harus dilakukan pendampingan dengan baik, dilakukan kajian dengan matang sehingga BUMDes-BUMDes yang dikelola oleh Ibu Dirjen yang di bawah kepemimpinan Ibu, ini agar bisa eksis dan memiliki pengaruh besar di tengah-tengah lingkungan masyarakat pedesaan itu, karena nanti akan menyerap tenaga kerja, akan berdampak pada perekonomian di desa tersebut.

Namun Bu, tadi di capaian prioritas tahun 2022 ini masih ada yang belum terlaksana secara sempurna ini, Bu, jadi untuk BUMDes mestinya 100% atau 500 ini baru tercapai 499 atau 99,88%, ini masalahnya apa? Apakah karena badan usaha belum ada? Atau karena faktor-faktor administrasi yang ada kenapa sampai tidak bisa terserap, masalahnya apa? Ini mohon dicermati dan disiapkan sejak dini biar anggaran yang kita persiapkan ini betul-betul bisa tertunaikan dengan baik dan manfaat berkah untuk pembangunan desa dan pembangunan masyarakat di desa tersebut, karena yang lain bisa 100%, BUMDes bersama bisa 100% apa bedanya. Ini tolong dijelaskan, Ibu.

Kemudian, yang selanjutnya Pak Ditjen PDP. Ini kami mempertanyakan tentang pagu sosialisasi yang menurut kami cukup besar tapi nanti mungkin Pak Dirjen bisa menjelaskan kenapa *kok* besar *gitu* untuk satu desa, ini di *slide* nomor 10 ini, Pak, di paparan *panjenengan* ini, Pak.

Jadi, sosialisasi bimtek berketahanan pangan pagunya 420 juta untuk lima Kelompok Masyarakat (Pokmas), atau kalau kita rinci ini berarti tiap Pokmas ketemu angkanya 80 juta per-Pokmas. *Nggak* apa-apa kalau memang *output*-nya memang bagus dampak positif yang bagus *nggak* apa-apa cuman kita ingin minta penjelasan.

Kemudian yang kedua, ini Sosialisasi Bimtek Desa Bersih Narkoba, angkanya 817 juta untuk 8 desa, berarti kurang lebih sekitar 102 juta per desa. Ini apa bentuk kegiatannya dan memang ini sangat penting, Pak. Jadi, memang kita harus bahu-membahu, gotong-royong, tolong-menolong untuk mengantisipasi berkaitan dengan masalah narkoba ini, ini karena memang sangat berbahaya pengaruhnya dan bisa meruntuhkan moralitas bangsa kalau tidak diantisipasi sedini mungkin. Cuman kami ingin *tau* anggaran sebesar ini

bentuk kegiatannya apa dan kemudian dampak atau nilai positif atau *output*-nya ini kira-kira apa?

Kemudian yang ketiga, sosialisasi buku saku berkelanjutan, PAMSIMAS dan Panduan Desa Tanggap Bencana nilainya 242 juta untuk satu kegiatan. Jadi, apakah pagu yang cukup besar ini untuk sosialisasi dengan desa penerimanya yang sangat sedikit ini merupakan program berkelanjutan, Pak, atau *multiyears* ya. Kami minta angka yang menunjukkan progres dari sosialisasi ini jika memang dimaksudkan untuk menjangkau lebih banyak desa. Saya rasa program ini semakin banyak yang dijangkau akan semakin bagus dan dampak positifnya ini yang kita harapkan.

Saya rasa itu Bapak Dirjen, Ibu Dirjen, Bapak-Ibu sekalian yang kami sampaikan. Saya rasa semuanya kita sepakat bahwa kita bersama-sama saling sinergi untuk memajukan desa-desa kita dan desa-desa seluruh negeri kita tercinta ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hamid.

Selanjutnya, saya persilakan Pak Ishak Mekki dan siap-siap setelahnya Bapak Sigit Sosiantomo. Silakan, Pak Mekki.

F – P. DEMOKRAT (Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V,
Yang saya banggakan para Pak Dirjen dan Bu Dirjen beserta jajaran,
Hadirin yang berbahagia,**

Kami langsung saja ke Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Saya mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Tamanuri tadi.

Memang, ya, berkembangnya transmigrasi itu memang agak lambat dan dari beberapa puluh tahun baru kelihatan sedikit hasilnya dan harapan kita bagaimana supaya PDT ini, ya, pembangunan dan pengembangan ini mengembangkan yang daerah-daerah yang transmigrasi lama, seperti paritnya sudah dangkal, sehingga airnya asam, tidak bisa mengairi persawahan, bagaimana pupuk, ya, langka, masyarakat transmigrasi susah mendapatkan, bagaimana bantuan ternak itu yang bermanfaat daripada menurut saya apa yang saya lihat di sini seperti di Sumatera Selatan, banyak sekali poin-poin

item-item-nya tapi *item-item* ini menurut saya ya seperti supervisi, seperti *monitoring*, pembekalan dan kecil-kecil dan sebagainya.

Nah, menurut saya, lebih memang Menteri PDT itu harus paham dan *tau* persis apa yang terjadi permasalahan-permasalahan di desa. *Nah*, untuk membangunnya itu mitra, ajak mitra Menteri PU tadi jalannya, seperti narkoba tadi ada di narkoba, ada badan narkoba di kabupaten, di provinsi dan sebagainya, libatkan mereka. Tidak perlu di sini PDT harus terjun langsung, karena ada yang menanganinya, ya jalannya, irigasinya, ajak SDA dan sebagainya, sehingga ini bisa fokus dan bisa maju dan mereka merasa terbantu, jangan uang sedikit habis untuk administrasi saja ini, tidak menuntaskan permasalahan, itu pertama.

Kedua, PDT, Kementerian PDT dan berbagai Dirjen bagaimana memacu desa-desa dan supaya menjadi desa mandiri, *nah* berbagai aspek dipacu dan setelah mandiri, mereka dapat penghargaan sertifikat, tapi ini menjadi kendala bagi mereka. Setelah mandiri bantuan-bantuan agak sulit untuk didapatkan lagi. Kedua, pencairan dana juga yang desa yang tidak ada...tidak mandiri bantuannya 1 miliar lebih mereka di bawah itu 900-an. Ketiga, mereka yang tidak mandiri, tiga kali dalam tahun pencairan mereka dua kali dalam pencairan dipersulit.

Nah, semestinya yang mandiri ini harus diberikan *policy* yang lebih baik lagi, dipacu lagi, jangan diberhentikan membantu-membantu dan juga pembekalan terhadap mereka ini supaya betul-betul mandiri lebih cepat lagi.

Nah, ini baru mandiri mereka *down* lagi ya karena bantuan berkurang dan sebagainya. *Nah* ini tolong diperhatikan, karena semestinya ada bantuan khusus untuk desa mandiri ini tidak berupa penghargaan sertifikat, namun bantuan pembangunan-pembangunan yang lebih banyak lagi.

Ketiga, saya ke secara keseluruhan, saya mendapatkan keluhan dari para kepala desa. Memang kepala desa ini dari *background*-nya memang bukan dari PNS, mereka dari rakyat biasa terpilih. *Nah*, jadi masalah laporan keuangan ini menurut mereka sangat *ngejelimet*, sangat susah, tidak simpel, bagaimana supaya ke depan ini lebih *gampang* dan tidak rumit, *nah* ini harus diberikan kepada mereka, karena mereka tidak memahami dan ilmu mereka masih sangat kurang, *nah* sehingga perlu bimbingan.

Nah, itulah tenaga pendamping desa itu tidak hanya melihat proyek-proyek, iya harus bina mereka dalam bentuk keuangan ini supaya mereka paham, tidak terjebak.

Ada *statement* Jaksa Agung ya harus dimaklumi karena kerumitan daripada administrasi keuangan desa. *Nah*, ini Jaksa Agung saja memahami itu. *Nah*, jangan sampai ada penyelewengan dipahami, dimaklumi-dimaklumi, *nah*, ini harus diberikan pembelajaran yang pas untuk mereka, ini menurut saya supaya mereka lebih bermanfaat lagi.

Terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Dirjen, khususnya Pak Dirjen Transmigrasi, program permasalahan transmigrasi, tadi disampaikan Pak Tamanuri dan Pak Ishak Mekki, beliau ini yang satu...Pak Tamanuri ini mantan bupati, Pak, kemudian Pak Ishak Mekki ini mantan wakil gubernur. Jadi mereka paham benar persoalan-persoalan yang ada di daerah transmigrasi.

Ya, kami persilakan kepada Bapak Sigit silakan, Pak, dan siap-siap Bapak Toriq Hidayat.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Baik, terima kasih Pimpinan sidang.

**Yang kami hormati para Anggota Komisi V,
Yang kami banggakan para Dirjen,
Bapak-Bapak dan Ibu Dirjen yang hadir pada kesempatan kali ini,**

Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman tentang transmigrasi ya, saya tidak menyinggung terkait dengan transmigrasi. Ada dua, ada dua *stressing* saya dan saya dalam forum ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen, Pak Sugito dan Bu Dirjen Herlina, karena gampang sekali ditelepon Pak Pimpinan, gampang sekali kami mengontak beliau sehingga diskusinya bukan hanya formal diskusi di gedung DPR tetapi kita bisa panjang lebar berbicara di telepon.

Sebagaimana yang sudah saya sempat bicarakan di telepon, jadi ini terkait dengan Bu Dirjen Harlina, terkait dengan investasi, ya, pembangunan ekonomi dan investasi desa.

Ada desa-desa yang secara ekonomi dia sudah maju dan mandiri, terutama BUMDesnya. BUMDesnya itu bahkan membawahi IKM, ya, IKM betul ya IKM sampai 300 IKM satu BUMDes. Bisa dibayangkan bahwa kegiatan BUMDes nya sudah sangat maju, itu di satu desa di dapil saya.

Nah, yang mereka butuhkan itu adalah perlindungan karena BUMDes mereka yang 300, yang punya anggota 300 IKM itu memproduksi barang-barang yang terkait dengan besi. Ada limbah-limbah akibat dari kegiatan IKM itu yang masuk dalam kategori limbah B3.

Oleh karena itu, saya kira Bu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa perlu melindungi mereka. Setelah mereka maju kan perlu...perlu payung hukum, bagaimana agar mereka bisa bekerja tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Selama ini mereka biasa-biasa saja buang sarung tangan atau dibakar begitu. Perlu untuk desa-desa yang sudah mandiri dan

sudah memiliki kegiatan yang sudah bagus seperti ini untuk dibuatkan payung hukum agar mereka tidak didatangi Polres atau Polsek. Karena kalau di...karena kalau dilihat mereka melanggar ya, melanggar cuman kan mereka sebetulnya karena ketidaktahuan, karena ketidaktahuan mereka ya, akibatnya jadi sarang-sarang suap dan seterusnya ya, mereka dimintain harus bayar sekian dan angkanya lumayan besar untuk ukuran BUMDes IKM, ya, 50 juta, 35 juta, ya. Kalau mereka melawan *nyengkel* dan seterusnya bisa naik lagi bisa 200 juta.

Jadi, melalui forum ini saya minta kepada Bu Dirjen untuk membuatkan payung hukum, *entah* disambungkan dengan siapa, mengadvokasilah, Bu Dirjen. Karena ini sudah bagus ini, ini Ibu bisa menjadikan kegiatan BUMDes di desa yang sudah maju ini sebagai salah satu bagian dari promosi kegiatan Menteri Desa, yaitu memberi payung hukum melindungi usaha-usaha yang sudah berkembang, itu yang pertama, poin pertama.

Oleh karena itu, saya menunggu respon balik dari Bu Dirjen kira-kira disambungkan dengan siapa kalau sudah urusan limbah B3 ini. Syukur-syukur Ibu Dirjen memiliki satu tim kerja yang bisa memfasilitasi mereka-mereka yang berurusan dengan persoalan limbah B3.

Yang kedua, di desa yang tidak jauh dari desa yang saya ceritakan tadi, ada sebuah desa yang kawasannya itu menjadi mayoritas lahan Angkasa Pura, yaitu mayoritas lahan lapangan terbang Juanda di Surabaya. Lapangan terbang Juanda itu di Sidoarjo, Bu, makanya kalau kita dulu kita *landing* "Selamat datang di Juanda, Sidoarjo di Surabaya *gitu*", jadi bingung juga kita mendengarkannya. Oh ya, selamat datang di Bandara Juanda, Surabaya di Sidoarjo, memangnya ada Bandara Juanda di Surabaya? Ya, itu Bandara Juanda di Sidoarjo itu.

Mereka sejak berdirinya bandara itu tidak pernah mendapatkan CSR, mungkin Bu Dirjen bisa memfasilitasikan. Kan kami tidak pernah atau kita jarang ya bicara CSR dengan Angkasa Pura atau dengan BUMN, sementara Ibu punya peserta CSR ya. Ada CSR Award yang Ibu sampaikan tadi yang melibatkan 63 BUMN, saya kira desa-desa seperti itu sangat membutuhkan CSR. Satu CSR senilai 200-300 juta sangat bermanfaat bagi mereka, ya, itu bisa bercerita macam-macam daripada dana BUMDes, yang Bu Dirjen, terima kasih sudah keluar SK-nya ini saya dapat 27, iya kan 2 miliar dibagi berapa itu akhirnya jadi 27, banyak.

Saya *kok alhamdulillah* banyak ya, *nggak tau* ada hubungan apakah kita ini *gitu* yang perlu diteliti, iya. Ini ada daftarnya di sini 27. *Waduh gawat*, jangan Bu, kita satu, kita satu teman satu perjuangan ini, iya PKS perjuangan.

Jadi saya berterima kasih SK-nya sudah ada, kayaknya ini ya Bu Dirjen ya, ini sekalian teman-teman mungkin dicek untuk *ngecek* kalau *nggak* harus segera, harus segera disampaikan ke Bu Dirjen.

Ada CSR Award Bu, jadi, tadi harapan kami Ibu Dirjen bisa menyambungkan desa-desa yang berada di sebelah BUMN strategis, ya, atau

BUMN yang “kaya” gitu ya untuk bisa membantu desa-desa terkait. Saya kira ini laporan kepada Bu Dirjen, ada satu desa di mana mayoritas lahan desanya itu dipakai oleh bandara dan dia belum pernah dapat CSR.

Saya sudah berusaha mencari jalur untuk bisa mendapatkan itu, tapi masih belum ada ininya...apa namanya belum ada jalur yang kuat. Oleh karena itu, kami berharap Bu Dirjen bisa membantu dan ini bisa masuk program Ibu nanti, mungkin bisa memasukkan pada desa yang layak menerima CSR, itu untuk Bu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi, iya pengembangan ekonomi dan investasi desa.

Untuk Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, ini lebih menarik lagi. Pak Dirjen, inisiatif dari masyarakat desa itu sebetulnya banyak. Saya kemarin mengunjungi satu desa mereka punya kolam pancing. Kolam pancingnya banyak dan itu milik perorangan, jadi ada Bapak-Bapak atau ada orang punya tambak 4 hektar itu, ya, yang dijadikan kolam pancing.

Nah, sayang sekali desa itu tidak mendapatkan apa-apa padahal di situ ada mobil, ya, dari berbagai tempat. Pengunjung kolam pancing, ada beberapa kolam pancing. Pengunjung kolam pancing itu dari Surabaya, dari Lamongan, dari berbagai kota di sekitar Sidoarjo.

Maksud saya perlu dibantu Pak Dirjen dengan apa namanya dengan pengelolaan apa LPMD, apa, Pak, ini apa BPD. Perlu Pak Dirjen membantu BPD untuk bisa merumuskan ya, aturan-aturan atau Perdes yang memungkinkan misalnya parkir bayar ke desa *gitu*, misalnya yang lewat bayar ke desa, kemudian sekian persen.

Nah, itu kan kalau hanya BPD saja, antar BPD bisa ramai karena satu BPD isinya 5 orang, ya, Pak, ya atau 4 orang, 5-9. Bayangkan 9 orang, jadi pemilik...pemilik kolam pancing itu dari desa sebelah, sementara kolam pancingnya di desa ini ya, berarti kan harus ada komunikasi antar dua desa. Bayangkan kalau 9 orang ketemu 9 orang bisa ramai *nggak karu-karuan gitu* kan. Kalau Pak Lurah ketemu Pak Lurah, mungkin saja bisa selesai, tetapi perlu ada apa legislasi perdesa. Bantulah, Pak Dirjen ya, bantulah dengan Perdes atau arahan-arahan sehingga antar desa itu berkembang, karena ekonomi bertumbuh di situ.

Dan, memang yang paling gampang itu tadi desa wisata, program Bapak yang namanya desa wisata. Sayang sekali dananya kecil, saya minta 1 miliar *gituloh* desa wisata itu, tapi ternyata Pak Dirjen cuman bilang cuma ada 300 Pak Sigit, 400 ada ya. Jadi Pak Dirjen, dari dialog ini mungkin juga didengarkan oleh teman-teman silakan teman-teman *rame-rame* minta ke Pak Dirjen desa wisata 400 jutaan *gitu*, *nah* 10 biji juga bisa satu desa.

Jadi, memang kita semua juga akan berusaha untuk membantu Pak Dirjen pasti ya, Pimpinan, kita akan berusaha seandainya masih ada alokasi lebih *gitu* kan, ya kita pasti akan mendukung Pak Dirjen pengembangan desa, pembangunan desa dan pedesaan atau kalau ada. Sekarang kan APBN masih bisa sekarang, setelah covid kan sekarang APBN sudah ada lagi...apa

namanya APBN-P *gitu*, mudah-mudahan nanti di APBN-P bisa dapat tambahan, pasti kita akan bantu Pak Dirjen, yang penting Bapak komitmen agar setiap anggota itu bisa mengusulkan, apa namanya, apa tadi desa wisata masing-masing di dapilnya begitu, karena manfaatnya besar, pertumbuhan ekonomi kadang-kadang muncul dari desa dan bukankah Undang-Undang Desa itu kita buat dulu dalam rangka untuk membantu atau *engine of growth* katanya dulu, kerennya begitu bahasa Maduranya, *engine of growth* dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, mesin pertumbuhan ekonomi.

Saya kira demikian, ya, Pak Dirjen, ada dua Dirjen yang saya ingin menyampaikan pendapat saya dan harapan semoga bisa mendapatkan solusi ya, *as soon as possible*.

*Aqulu Qouli Hadza
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Terima kasih.

Jadi, Pak Dirjen itu, Pak Dirjen, kalau ada slot bisa ditambah dan anggaran dana desa itu jangan 400 ya, Pak ya, minimal 500-lah atau 1 M. namanya kita membangun desa, desa itu harus indah dan cantik *gitu*.

Ya, selanjutnya kami silakan Pak Toriq Hidayat dan siap-siap setelahnya Pak Djenri. Silakan, Pak Toriq.

F – PKS (K. H. TORIQ HIDAYAT, Lc.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan Komisi dan rekan-rekan yang saya hormati,
Para Dirjen,
Bapak-Ibu Dirjen, dan
Rekan-rekan yang saya hormati,**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama mumpung *nyambung* apa yang sampaikan oleh Pak Sigit tadi ini tentang desa wisata.

Memang kalau melihat anggaran kecil 400 itu, kalau istilah sunda itu tidak ke mana-mana, ke sana *nggak* cukup ke sini *nggak* cukup tapi lumayanlah, tapi walaupun kecil yang ingin saya tanyakan itu hasil yang dicapai dari anggaran walaupun kecil itu untuk ke desa yang mendapatkan program desa wisata itu seperti apa hasilnya.

Kemudian, tadi sampaikan tentang ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagus kalau kemudian ada data tentang pertumbuhan ekonomi desa wisata itu.

Kemudian, karena desa wisata itu kan di Kementerian Pariwisata juga ada. Dulu saya di Komisi X, *tau* tentang itu, sudah barang tentu sudah ada anggaran yang ada juga di Kementerian Pariwisata.

Nah, yang ingin saya tanyakan itu, perbedaan penggarapan penanganan Kemendes dan, dengan Kementerian Pariwisata terhadap desa wisata ini seperti apa, jangan sampai ada yang tumpang tindih, ini juga perlu ada penjelasan.

Kemudian berikutnya, yang kedua untuk Ibu Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi. Tahun 2024 itu ada kewajiban untuk sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia, *nah*, termasuk tentu saja produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM yang bertebaran di seluruh desa di Indonesia ini.

Ini usul saja, Bu, agar ada pelatihan untuk BUMDes, BUMDesma tentang produk-produk halal ini, tentang sertifikasi bukan produk halalnya, tentang sertifikasi produk-produk halal ini. karena kalau di desa itu kan, ini betul-betul masih buta tentang hal ini, sementara kita *tau* bahwa mayoritas penduduk kita itu muslim dan masalah makanan halal ini masalah *fundamental*. Ini sesuatu *nggak* bisa ditawar-tawar dan *nggak* bisa digantikan, karena itu ini menjadi penting pelatihan bagi BUMDes-BUMDesma untuk ke sertifikasi halal ini.

Kemudian berikutnya, ini sebetulnya kemarin tapi karena saya tidak bisa hadir kemarin yaitu untuk Kepala BPSDM. Titip saja ini, para Dirjen untuk disampaikan kepada Kepala BPSDM itu tentang keberadaan pendamping desa. Dari beberapa obrolan, beberapa pertemuan dengan kepala-kepala desa dan aparat desa yang ada di dapil, dapil XI, itu saya bisa menyimpulkan tentang ekstrimnya itu bahkan apa, keberadaan pendamping desa ini ditiadakan *aja* atau kalau mau dilanjut itu perlu ada pengkajian yang lebih dalam lagi, karena dari sisi efektivitas, itu sangat-sangat tidak efektif.

Ada beberapa alasan kenapa tidak efektif keberadaan pendamping desa itu, pertama umumnya para pendamping desa itu tidak berdomisili di desa tersebut. Kemudian yang kedua, mereka itu rata-rata menangani beberapa desa, beberapa desa, banyak desa, bahkan ada yang tujuh desa. Kemudian yang ketiga, sudah banyak desa yang ditangani, didampingi, kemudian mereka *ngambil* juga di luar sehingga tidak fokus, akhirnya *nggak* banyak efek manfaat untuk desa yang didampingi oleh petugas ini.

Kemudian, juga di...di...di kabupaten itu kan ada, dinas yang menaungi tentang hal ini di kabupaten itu, juga di kecamatan itu kan kecamatan itu ada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) *tuh*, kenapa tidak diefektifkan ini dan mereka itu sudah PNS sehingga ini...anggaran kan bisa-bisa dialihkan untuk anggaran yang lain. Umpamanya yang saya maksud dengan pengalihan

anggaran itu kan, selama ini kan tidak ada dari dana desa itu anggaran untuk rehab, rehab gedung balai desa, yang ada untuk olahraga dan lain sebagainya tapi untuk gedung balai desa itu tidak ada dan ini mereka kesulitan untuk desa-desa yang memiliki keterbatasan anggaran, belum mandiri, atau belum maju, di sana-sini banyak kerusakan dan dibiarkan saja dan mereka malah mintanya ke kita, minta dibantu yang sudah barang tentu kalau dari pribadi ala kadarnya *gitu*, kita pun tidak bisa membiarkan mereka itu.

Jadi tolong masalah ini, karena anggaran tetap dikeluarkan perlu dikaji ulang tentang keberadaan pendamping desa ini, kalau memang efektif ya lanjutkan kalau tidak mending dibatalkan dialihkan anggarannya atau mungkin ada beberapa desa yang memang dengan karya tertentu, tentu saja ini nanti dilihat dari data ini pantas harus ada pendamping, kalau desa ini *nggak* perlu, bisakah sampai sejauh itu?

Kemudian hal lain, ini ada latar belakang politis. Ini saya kira temen-temen juga ada yang menyampaikan tentang ini, yang pasti di daerah kami itu latar belakang politis ini atau hal-hal yang terkait dengan politis ini sangat nampak, sehingga kalau kemudian ada pengumuman untuk rekrutmen itu hanya mereka-mereka yang dengan warna tertentu yang *tau* persis tentang kapan akan ada tes dan yang lainnya itu *blank aja nggak tau* informasi tentang itu sehingga mau tidak mau ketika rekrutmen itu hanya kalangan tertentu saja dan ini menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Ini beberapa hal yang menurut saya ini betul-betul perlu dipertimbangkan tentang keberadaan pendamping desa itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Pimpinan dan para Dirjen.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Toriq.

Selanjutnya, saya persilakan Pak Djenri dan siap-siap Ibu Neng Eem setelahnya.

F – PDIP (DJENRI ALTING KEINTJEM, SH, MH):

Makasih, Pimpinan rapat, dan Mitra rapat kita hari ini,

Saya baru dapat kebagian hari ini, Pak, kemarin padahal saya mau...mau bicara juga, tapi karena kita kan kemarin dikejar waktu, karena ada Rapat Paripurna yang spesial tiba-tiba. Rapatnya jam 2, jam 6 undangan, 6

sore undangannya masuk ke aku, kemarin, ya mungkin Hp-ku yang bermasalah, jadi saya mau bicara hari ini.

Dari kemarin, Pak, kita bicara tentang ini masalah, masalah-masalah di PDT ya, tapi yang saya heran di situ masih ada menyebut desa tertinggal, kemarin. Saya iri dengan dana-dana yang di daerah otonomi khusus DKI Jakarta, Yogya, Papua dan segala macam, mereka ada dana khusus padahal kita bicara masalah tertinggal ini.

Soekarno pernah bilang kalau kita mau membangun negara ini Soekarno bilang harus membangun dari bawah, dari desa. Tapi, saya heran alokasi anggaran kita 3 triliun lebih, mau bikin apa itu di desa tertinggal, sementara masih mayoritas 80% desa kita di Indonesia ini masih di desa, makanya banyak permasalahan-permasalahan tadi walaupun sudah ada begitu banyak terobosan yang di... mau dibuat, mau angkat desa supaya lebih bagus, itu ada BUMDes dan segala macam, tapi tiga koma sekian triliun apakah bisa membuat desa kita lebih baik.

Anggaran saja untuk pendamping desa di situ 1 triliun lebih setengah hampir 50% lebih, yang dalam tanda kutip pendamping desa itu dari kemarin *dinyinyir* terus oleh teman-teman, ya. Habis hanya untuk pendamping desa ini Kementerian ini, bahkan ada yang bilang evaluasi tidak perlu ada pendamping desa. Saya bingung jangan-jangan memang benar isu-isu yang mengatakan bahwa pendamping desa ini hanya titipan *doang* untuk tujuan-tujuan politis dalam tanda kutip, mudah-mudahan tidak benar ya, Pak, Ibu, mudah-mudahan tidak benar, karena ada yang mengatakan kalau mau jadi pendamping desa itu harus punya KTA, *nggak tau* benar atau salah itu ya, ya, katanya ya.

Sehingga, memang menjadi tanda tanya bagi saya, benar anggaran kita untuk kementerian ini hampir 50% habis untuk pendamping desa, ya. Kalau memang benar pada akhirnya ada kesepakatan pada anggaran-anggaran berikut ini pendamping desa ditiadakan, ya *monggo* mari itu orang bantu sama-sama apa yang menjadi permasalahan di desa tadi saya lihat ada untuk pembangunan jalan di lokasi transmigrasi, ya.

Saya datang ke Jakarta pada, kemarin itu, sebelumnya bertemu dengan para Kades dan hukum tua-hukum tua, kepala desa di beberapa kabupaten/kota walaupun bukan dalam suasana reses ataupun dapil, tapi ada yang datang ke rumah kurang lebih berapa kepala desa menyampaikan hal-hal ini ya, luar biasa pengeluhannya tapi saya mau jawab seperti apa dengan anggaran cuma 3 triliun sekian, ya.

Di salah satu daerah, saya kasih contoh di salah satu daerah saya di Bolaang Mongondow, di situ ada transmigran sudah beberapa puluh tahun. 30 tahun terakhir ini jalan yang sudah menjadi 4 desa, ya, di bekas transmigrasi Bali karena gunung meletus di sana waktu. 30 tahun, Bu, jalannya tidak dibuat, padahal lokasi transmigrasi itu sudah berkembang menjadi 4 desa, ya, di Bolmong Raya itu, sehingga saya minta juga dicatat itu Bu, Bapak, transmigrasi ya.

Saya lihat tadi ada alokasi untuk itu 2023, tolong diperhatikan. Sudah 30 tahun jalan yang lingkar di situ padahal di situ merupakan produksi beras, salah satu lumbung padi di Sulawesi Utara, tapi sampai hari ini mereka mengeluh. Mereka melakukan rapat dan mengusulkan kepada saya, "Pak Djenri tolong dititip ke Kementerian Desa, supaya jalan kami di perhatikan itu", itu ada di daerah Kabupaten Bolmong itu.

Kemudian, bagaimana kalau seandainya terjadi pendamping desa ini sudah tidak di...di...di...di adakan lagi, anggaran-anggaranmu itu untuk yang satu koma sekian triliun lebih, kasihilah untuk...untuk desa membangun desa itu.

Yang kedua, masalah BUMDes dari kemarin. Memang BUMDes ini jadi semacam idola sekarang di desa. Begitu ada dana yang diambil dari dana desa, tapi yang anehnya bagi saya latar belakang saya orang hukum harusnya dibuat aturan sebelum ada pendirian BUMDes itu, badan hukum dulu yang harus dibuat, harusnya badan hukum, sehingga sekarang ada aspirasi.

Ya, Bapak tadi bersyukur 20 lebih dia dapat, saya cuma dapat 5 susah mau salurkan karena BUMDes nya sudah ada tapi badan hukumnya *nggak* ada *gimana* ini Indonesia ini begini. Seperti koperasi, harus buat koperasi badan hukumnya dulu *dong* yang dibuat. Ini BUMDesnya sudah berjalan, dananya sudah dialokasikan berapa tahun, tapi BUMDesnya *ndak* jelas jalannya seperti apa, sehingga saya mau salurkan aspirasi saya untuk 50 juta itu *aja* susah karena badan hukumnya *nggak* ada, lalu mereka katakan, saya tidak bisa bikin badan hukum karena saya harus datang di Kementerian Desa.

Loh kalau di desa yang sangat terpencil *kayak* saya di pinggiran berbatasan dengan Filipina anggaran mereka ternyata...mau...di Jakarta mau membuat badan hukum ambil dari mana, sehingga saya usulkan pihak kementerian ini khususnya yang mengurus masalah itu jemput bola ke bawah *dong*. Coba tolong diinventarisir mana BUMDes-BUMDes yang belum punya badan hukum, mari kita kerja sama buat sama-sama sehingga kita juga *nggak* kesulitan.

Saya katakan begini untuk BUMDes-BUMDes itu, karena ada persyaratan harus menerima aspirasi itu yang 50 juta harus ada berbadan hukum. Jadi, yang selama ini ambil dari dana desa itu berarti tidak sah juga kalau belum ada badan hukum, sementara ada BUMDes-BUMDes yang habisnya hanya untuk simpan pinjam atau pengurusnya yang jadi kaya raya, ya kan.

Logikanya dana bagi hasil dari dana desa itu yang berapa persen untuk BUMDes itu berarti illegal *dong* kalau tidak ada badan hukum, sehingga saya katakan begini jalan keluarnya karena saya sudah mau alokasikan itu. kasih *aja* walaupun ada badan hukum, yang penting tidak ada tindak pidana *situ*, tidak ada usaha untuk korupsi di *situ*, yang penting dipertanggungjawabkan dan nyata apa yang dibuat untuk 50 juta itu, nanti saya bertanggung jawab, yang penting tidak ada indikasi pidana di situ, ya.

Mungkin hal-hal ini, Pak, yang bisa saya katakan, kemudian saya kasihan dengan kepala-kepala desa, ya. Ternyata alokasi dana desa sekarang itu kalau memang kita mau buat sama dengan daerah otsus yang dapat sekian triliun...miliar, ya diperhatikan. Karena selama ini ternyata dari desa itu yang dikelola oleh para kepala desa itu cuma berapa persen, apalagi dipotong dengan *corona* ini ya, diadakan untuk *corona* ini. Ternyata kepala desa hampir 1 miliar untuk desa besar atau 1 miliar lebih, cuma berapa persen yang dia bisa olah kepala desa, sementara dia berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari.

Saya juga usul karena presiden saja sudah mencabut PPKM, *toh* 1 Januari ini presiden cabut PPKM untuk *corona*. Dana untuk penanggulangan penanggulangan apa itu *corona* ini, dipindahkan saja lagi, ditarik aja, karena itu kurang lebih berapa persen yang dipindahkan ke penanggulangan *corona*.

Yang terakhir, ini Kementerian Desa mungkin Pak Dirjen atau Ibu. Mereka berteriak dengan tunjangan perangkat. Tunjangan perangkat desa, hukum tua dan kalau lurah kan dapat gaji negara, mereka tidak kasihan cuma dapat tunjangan.

Saya tidak mau hubung-hubungkan dengan jabatan 9 tahun seperti yang heboh terakhir-terakhir ini, ada yang minta 9 tahun silakan mau diproses atau tidak, presiden *aja* cuma 5 tahun, kita-kita di sini *aja* cuma 5 tahun. Bagaimana Kementerian Desa ini, apalagi kalau pendamping desa ini sudah ditiadakan *loh* kita perjuangkan tunjangan perangkat hukum tua kepala desa dan perangkatnya, itu yang perlu tolong perjuangkan, itu yang kita harus perjuangkan.

Karena apa, saya ini mantan ASN, dulu, dosen di kota (*suara kurang jelas*). Bukan gubernur, bukan bupati, atau pejabat lainnya yang berhadapan dengan masyarakat 1 kali 24 jam, ya, ini perangkat-perangkat di desa. Mereka kalau ada perkelahian di kampung jam 3 subuh mereka harus bangun, *kok* tunjangan mereka itu kasihan *loh*, apa boleh mau hidup selama berapa tahun.

Jadi saya minta dibicarakan lagi, agar supaya tunjangan untuk kepala desa dan perangkatnya di desa itu kita naikkan dari...ambil dari APBN. Kalau ambil dari APBD kabupaten apalagi provinsi *ndak* mampu, kecuali daerah-daerah besar seperti DKI Jakarta, tunjangan perangkat di kelurahan minta ampun, ya, lebih tinggi dari yang lain, sehingga saya usul terakhir itu jangan hukum tua, kepala desa, dan perangkatnya kita naikkan lagi di APBN, apakah di perubahan ini sudah ada atau di anggaran tahun berikutnya.

Terima kasih, Pak Pimpinan.
Terima kasih mitra rapat kita hari ini.

KETUA RAPAT:

Ya, selanjutnya kami persilakan Bu Neng Eem dan siap-siap, Pak Sudjadi.

F – PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo budhaya,

**Pimpinan, beserta
Anggota DPR RI Komisi V yang saya hormati, saya cintai dan saya
banggakan, serta
Jajaran dari Kementerian Desa dari Bapak Dirjen,
Ibu Dirjen, dan
Perangkatnya yang hadir di sini,**

Pertama, saya mungkin tidak bicara konteks ini dulu tetapi ada berkaitan. Jadi, saya di...apa menerima tamu dari masyarakat hukum adat, anak rimba, suku anak dalam rimba, Jambi.

Saya sebenarnya agak...apa ya, agak apa...agak-agak sedih juga *gitu* kan karena apa mereka itu warga negara Indonesia, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

Kita *tau* masyarakat rimba hukum...anak dalam di Jambi itu hidup di hutan, tetapi kemudian ketika hutannya menjadi HGU, gitu kan mereka terusir sampai kemudian ada yang ditembak dan lain sebagainya seperti itu, dan beberapa mungkin ada yang keluar hutan. Hutan yang dulu menjadi sumber kehidupan mereka berubah menjadi kebun sawit, seperti itu, bahkan mereka ada yang bilang makanan sudah tidak ada, ada yang terpaksa kemudian makan buah sawit sampai kemudian keracunan, banyak juga yang kemudian keluar dari hutan ter...apa menjadi pengemis dan lain sebagainya dan mungkin yang punya kesadaran beberapa yang sering interaksi mereka juga kemudian ingin menetap.

Ketika berusaha ingin menetap ingin punya KTP, sebagai warga negara kan bukti sah secara yuridis bahwa dia warga negara Indonesia satu, punya KTP. Ingin mempunyai KTP *saja*, apa kemudian ke pemerintahan desa setempat ternyata tidak bisa juga, karena apa, karena mereka tidak punya akta kelahiran. Beberapa udah ada yang masuk Islam, ada juga masuk agama yang diakui oleh negara, karena mereka kan punya dewa-dewa *kayak gitu* ya leluhurnya itu jadi tidak, bukan agama yang ada di Indonesia yang apa sah diakui gitu kan.

Mereka beberapa akhirnya agar bisa ada yang masuk Islam, ada yang masuk Kristen dan lain sebagainya, dari situlah kemudian mereka mungkin agak berinteraksi, terbimbing, dan lain sebagainya dan mereka ingin mendapatkan akses sebagai warga negara itu anaknya ada yang sekolah, beberapa yang bisa sekolah tetapi ketika sampai udah kelas 6 untuk mendapatkan ijazah *aja* ternyata tidak bisa, karena tidak punya akta kelahiran, seperti itu. Ketika sakit mereka tidak diterima di Puskesmas setempat seperti itu, ini.

Jadi ini mereka itu manusia ya. Saya berharap negara hadir dalam hal ini minimal institusi negara terendah di basis masyarakat yaitu desa. Kalau pemerintahan desa setempat tidak bisa mengakomodir, memfasilitasi mereka agar mendapatkan akses, dia bisa menjadi warga negara seutuhnya saya kira mungkin ini masyarakat hukum adat ini, mohon bisa difasilitasi agar mungkin ada berdiri pemerintahan desa adat, Pak, yang mungkin berbasiskan budaya-budaya lokal.

Kalau *indigenous* lokal mereka, kearifan lokal mereka sebenarnya sangat bagus mereka tidak boleh menebang pohon dan lain sebagainya, mengambil makanan itu hanya apa seperlunya dan lain sebagainya gitu kan. Karena budaya itu, tetapi ketika agak keluar mereka mengambil buah-buahan dianggapnya maling kan karena mereka *nggak...nggak tau gitukan* seperti itu. Terus juga tidak ada budaya ternak, karena biasanya mereka makan, makanan binatang, yang ada di hutan itu juga hanya seperlunya.

Jadi kalau kita ini saya, saya miris sebagai walaupun itu bukan dapil saya, tapi saya sebagai Anggota DPR RI ada RI nya di situ, Republik Indonesia, otomatis punya, apa ya, merasa punya kewajiban juga untuk menyampaikan, merasa juga ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan tugasnya untuk membantu mereka agar mereka dimanusiakan, agar kita semua sebagai penyelenggara negara baik eksekutif dan saya, kami sebagai legislatif bisa memanusiakan manusia yang ada tinggal di Indonesia dan hari ini secara *de facto*, mereka adalah orang Indonesia, bangsa Indonesia, tetapi secara yuridis mereka belum mendapatkan, belum mendapatkan pengakuan sebagai warga negara Indonesia, sehingga menyulitkan mereka untuk bisa hidup di negara sendiri.

Mereka pernah demo, Pak, jalan kaki ke Presiden, pernah ditemui sama KSP, memberikan untuk memang rekomendasinya untuk pemerintah agar membentuk pemerintahan hukum apa adat gitukan seperti itu agar mereka bisa *terfasili...sesuai* dengan budaya yang berlaku, tetapi kemudian tidak bisa dieksekusi di daerah. Mohon ini bisa menjadi atensi kita bersama untuk itu untuk, ya, nasib mereka dan sebenarnya mereka juga punya, Pak, dasar-dasar bahwa wilayah hutan yang ada kerja sendiri, itu di Batanghari ya, itu *tuh* sebenarnya apa hak penggunaannya ada di mereka itu surat-suratnya mereka simpan di museum karena kalau dipegang mereka mereka juga berbahaya karena semua menginginkan itu dan memang ini juga sebenarnya kalau saya analisis memang agak pelik karena di tempat mereka itu juga ada mungkin kepentingan ekonomi, bisnis, karena ada sumber daya alam, minyak, terus kemudian batubara lain sebagainya *gitukan*, di daerah yang kemudian mereka tinggal, sehingga memang yang pengguna HGU, yang mendapatkan HGU itu untuk *shock therapy* agar mereka lari dari hutan itu, ya, beberapa ya ada yang ditembakin *gitukan*, dibunuh, walaupun tidak semuanya tidak-tidak mati tapi itu hanya untuk *shock therapy* seperti itu.

Jadi, apa, saya *nggak tau* pemerintahan apa, Kementerian Desa bisa apa untuk membantu nasib mereka, apakah bisa membantu untuk...ya itu yang pertama ada punya institusi yang bisa melindungi mereka, melindungi hak-hak mereka, memfasilitasi akses mereka sebagai warga negara Indonesia.

Saya *nggak tau* juga harus bilang apa, saya hanya beberapa merekomendasikan untuk audiensi dengan Komisi II, dengan beberapa yang apa Komisi IV yang terkait. Jadi, ini memang harus menjadi gerakan politik bersama Pak, di Indonesia kita mungkin aman, nyaman, bisa memiliki harta benda, bisa bekerja dan hasil kerja juga diakui secara hukum dan lain sebagainya karena kita punya satu *insert*-nya itu KTP dan lain sebagainya tapi mereka tidak bisa *gitukan*.

Ini, apa, saya berharap ini menjadi perhatian kita bersama bila perlu ya kita advokasi bersama arahnya seperti apa, kemudian harus ke mana, wilayah kemendesaannya itu apa kemudian yang bisa memfasilitasi sesuai dengan tupoksinya itu apa *gitukan* itu.

Terus kemudian, yang kedua, masalah karena memang Kementerian Desa ini kan lebih ke pemberdayaan pembinaan, ya, tupoksinya seperti itu otomatis beberapa desa ketika sekarang mendapatkan dana desa saya kira itu bermanfaat luar biasa karena beberapa hal desa bisa membangun walaupun mungkin kalau bicara ideal memang-memang belum karena memang keterbatasan dan lain sebagainya dan di sini Kementerian Desa sebagai pihak yang punya tupoksi untuk pembinaan, pemberdayaan, dan lain sebagainya, maka instrumen yang dimiliki adalah pendamping desa dan saya kira mungkin tidak hanya pendamping desa tetapi perangkat, terus kemudian BPD yang terkait dengan desa yang satu poksi terlibat, terus kemudian punya kewenangan untuk ikut membangun itu juga mungkin difasilitasi agar ada pemberdayaan SDM-nya, sehingga target desa bisa membangun itu bisa terjadi secara optimal.

Karena kalau kita bicara desa tentu dan dikaitkan dengan pembangunan nasional, saya kira, ketika kita memberdayakan desa, desa bisa membangun otomatis hampir merata. Maka Indonesia bisa membangun secara nasional dan hari ini memang pemerintahan pusat lebih fokus infrastruktur di pusat. Saya kira ini harus diimbangi juga dengan pembangunan di desa-desa, karena kantong-kantong masyarakat, rakyat, basis-basis produksi, agraris, sumber-sumber pangan, dan lain sebagainya, masyarakat-masyarakat yang mungkin belum...itu basisnya ada di desa.

Jadi ketika desanya berdaya, maka bangsa berdaya. Ketika desanya secara masif bisa membangun maka secara otomatis *gitukan auto* Indonesia juga membangun pembangunan nasional apa bisa terpenuhi seperti itu.

Sementara, mungkin itu saja dan untuk beberapa program yang Bapak-Ibu sampaikan, itu saya apresiasi bagus sangat dibutuhkan *cuman* memang satu, dari dulu dari rapat ke rapat bahwa sebab keterbatasan kita di masalah anggaran. Kalau anggarannya memang cukup sebenarnya program-program yang bagus karena programnya di Kementerian Desa itu kan bisa fleksibel dan bisa *populis* *gitukan*, dari sisi manapun bisa apa bisa masuk dan kalau anggarannya besar program-program itu sebenarnya harus kemudian banyak dan kemudian itu bisa massif, minimal terdistribusi di dapil-dapil kita di beberapa Anggota DPR RI minimal Komisi V-lah, itu bisa bisa terbantu.

Itu-itu bagus sekali karena memang manfaatnya dan itu memang kebutuhan gitukan secara faktor itu yang dibutuhkan, cuman sering sekali apa hanya sangat minim sekali *gituloh*.

Saya selalu bilang ini...ini seperti hanya formalitas agar bahwa kita ada program gitu kan, saya hanya merasa seperti kayak semacam simbol saja gitu kan, saya juga memaklumin karena memang anggarannya amat sangat minim tetapi kalau itu kemudian diperbanyak sebab kita juga ketika memberikan program itu kita misalkan bisa membantu bersama-sama bersinergi, otomatis kita juga akan mendapatkan benefit, ya, manfaat dan otomatis masyarakat sudah jelas *gitu* mendapatkan manfaatnya.

Mungkin itu saja, terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI Komisi V yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, dan juga dari Kementerian Desa, Bapak-Bapak Dirjen, Ibu Dirjen, dan beberapa jajarannya.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu Neng Eem.

Selanjutnya saya persilakan Bapak Sudjadi dan siap-siap Nanti Pak Anwar Hafid, silakan Pak Sudjadi.

F – PDIP (Ir. SUDJADI):

**Pak Ketua yang saya hormati,
Bapak Dirjen dan Ibu Dirjen, serta
Seluruh staf,**

Saya tidak bertanya cuman minta saran. Jadi, saya itu di dapil saya sudah lebih dari 20 desa wisata yang berkembang dengan baik. Saya membaca di sini dari Dit. Pengembangan Sosbud, kemudian dari ekonomi investasi ada program-program *software*. Kira-kira apa nanti kepada Bu Dirjen ekonomi investasi dan kepada Dit. Pengembangan Sosbud yang saya mintakan bantuan, apakah pendidikan, marketing, lalu percontohan dan sebagainya. Jadi, nanti saya menghubungi Bapak dan Ibu kira-kira apa yang bisa saya itu.

Yang kedua, ini *gampang* saja, Pak Gito, terima kasih, tapi Pak Gito saya kasih *tau* saja ya di proyek *panjenengan* itu pajaknya dipotong 11%, jadi jangan tertawa-tawa 400, Pak, itu dipotong 11%. Kemudian, kalau *nggak* salah bener *ndak* itu PPK *kok* dapat 3%, coba dicek bener *nggak*.

Nah, Bapak mohon belajar, bukan belajar ya tanya dari SDA pengairan, P3TG itu dibebasin oleh *anu* dirjen pajak karena dianggap seperti BLT. Jadi, bantuan program-program langsung kepada desa itu-itu klasifikasinya seperti BLT, jadi tanpa pajak. *Nah*, barangkali Pak Gito kalau itu bisa *panjenengan*

approach, panjenengan bisa menyelamatkan dari dana awalnya 400 apa 500 ya, itu menjadi kalau dipotong itu jadi 340 jadi duitnya kecil sekali tapi saya hanya menyarankan Pak, kalau-kalau tidak jangan dipaksa, kalau hanya kalau dari 500 ke 400 lalu turun dipotong pajak-pajak itu dananya tinggal 340, Pak Ketua.

Terima kasih, sekian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sudjadi.

Selanjutnya Pak Anwar Hafid dan siap-siap ini secara virtual nanti Pak Sumail, silakan Pak Anwar Hafid.

F – P. DEMOKRAT (Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita sekalian,*

**Bapak Pimpinan, dan
Rekan-rekan Komisi, sahabat Komisi V yang saya muliakan,
Bapak-bapak dan Ibu para Dirjen, dan
Seluruh jajaran Kementerian yang hadir pada kesempatan ini,**

Yang pertama, Pak Dirjen izin memperkenalkan diri karena ini rapat kerja saya yang pertama buat Pak Dirjen. Saya Anwar Hafid dari Dapil Sulawesi Tengah Fraksi Partai Demokrat.

Melihat apa yang telah dipaparkan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, saya dalam Pak Dirjen. Yang pertama, kepada Pak Dirjen pembangunan desa dan perdesaan.

Saya tertarik melihat bagaimana penanganan *stunting*, karena *stunting* ini adalah salah satu masalah di negara kita. Saya melihat ada program kegiatan pembangunan sarana air bersih di situ, karena memang salah satu hal yang menjadikan *stunting* ini tinggi di suatu tempat itu salah satunya adalah masalah ketersediaan air bersih.

Saya hanya ingin mendapatkan penjelasan sedikit, saya lihat di paparan ini justru kegiatan tahun 2023 itu, justru saya lihat terkena blokir AA itu, Pak. Ini kalau bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan *stunting* kalau ini masuk dalam blokir itu, saya tidak mengerti apa maksudnya blokir ini. Padahal ini sangat penting dalam rangka upaya kita untuk menyelesaikan kasus *stunting* sebagai *supporting* tim, ya, di negara ini adalah Kementerian PDT dalam rangka kita mengentaskan *stunting* ini di Republik Indonesia, itu satu.

Kemudian yang kedua, penguatan kapasitas Pak Dirjen, dalam rangka pencegahan *stunting* di desa itu kira-kira seperti apa, ini yang ingin saya minta nanti penjelasan karena ini sangat penting. Kira-kira dari Kementerian PDT apa yang akan dilakukan di daerah-daerah itu, sehingga sinergitas semua kementerian dalam rangka menuntaskan *stunting* ini bisa kita melihat dari Kementerian PDT apa yang menjadi bagian dari kementerian ini, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, pembangunan desa. Saya melihat dari Pak Dirjen, saya melihat Capaian Kinerja 2022, kemudian 2023. Saya kemarin juga mempertanyakan kepada Pak Sekjen, Pak, soal desa tertinggal dan sangat tertinggal. Saya pertanyakan ke Pak Sekjen kemarin tapi karena ini ada Pak Dirjen Desa dan Perdesaan, saya ingin kembali mengulang pertanyaan saya Pak Dirjen untuk mempertajam ini.

Kira-kira ada *ndak roadmap* kita yang bisa kami lihat, kira-kira sampai tahun berapa desa tertinggal di Indonesia ini bisa tuntas. Tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia ini. Malu juga kita bangsa yang besar ini terkenal di dunia tapi masih banyak desa tertinggal. Ini kan salah satu bentuk ketidakadilan pembangunan, ada desa yang sudah luar biasa maju tapi masih ada di desa yang tertinggal. *Nah*, kira-kira *roadmap* dari Kementerian ini bagaimana kira-kira kapan ya bisa tertinggal itu bisa kita entaskan di bumi Indonesia, sehingga semua desa minimallah menjadi desa yang berkembang, tapi jangan ada lagi desa tertinggal.

Malu kita, Pak Dirjen, kalau kita bicara hebat-hebat Indonesia presiden kita presidensial G20 tapi ternyata masih ada desa tertinggal *tuh*. Saya juga heran *nih* ini desa tertinggal bukan baru sekarang, udah lama Pak, tidak selesai-selesai, apa kira-kira persoalannya ini, semua Kementerian bekerja untuk ini.

Makanya kemarin saya bilang sama Pak Sekjen, Pak Sekjen kalau saya orang di Kementerian PDT ini, udahlah yang terlalu banyak bikin kegiatan fokus dulu ini. Dalam lima tahun ini bisa selesai tidak ada desa tertinggal di Indonesia saya angkat jempol buat kementerian ini, tapi sebanyak apapun kegiatan yang kita lakukan kalau desa tertinggal ini setiap tahun masih ada, bilang apa orang Pak, berarti tidak ada yang kita buat.

Ini saran saya, saya sangat apresiasi banyak sekali kegiatan dari Direktorat ini yang *alhamdulillah* sudah sangat menyentuh desa, saya hanya tergelitik saya soal ini, Pak, kapan nih selesai persoalan desa tertinggal di Indonesia, kasihan desa-desa kita dan desa-desa ini secara kasat mata sebetulnya tidak terlalu susah mengentaskan mereka, infrastruktur yang sangat tertinggal, pendidikan, kesehatan, air bersih, kan ini masalah-masalahnya ini, banyaknya kasus *stunting*, ya, persoalan-persoalan kesehatan kan persoalan di sini. Kapan ini bisa kita selesaikan. Jadi, kami mohon ada *roadmap* dari Kementerian dari Dirjen Desa dan Perdesaan, untuk kita menyelesaikan.

Saya bersyukur, memberi apresiasi bahwa banyak desa kita yang sudah maju, banyak desa kita yang sudah mandiri, tapi saya tidak bicara di situ

tapi saya bicara bagaimana cara kita fokus ke depan ini masih ada di masa kita ini masih ada dua Tahun Anggaran 2022-2023, setidaknya Pak Dirjen ada berkurang 50%.

Kami di Sulawesi Tengah itu masih ada kurang lebih sekitar 26 desa yang sangat tertinggal. Ini dibutuhkan, memang ini bukan kinerja Kementerian PDT semata, tapi butuh sinergitas semua dan *leading sector* adalah Kementerian Desa, saya kira. Kemarin teman-teman protes, sebenarnya Kementerian Desa, Desa Tertinggal ini tidak ada yang *ngurusin* ini Pak, kalau lihat nomenklatur Kementerian ini enggak ada yang diurusin Kementerian ini kan daerah tertinggal, harusnya yang disebut Kementerian, Desa Tertinggal, jangan Kementerian Daerah Tertinggal terlalu besar, Pak, untuk Kementerian yang anggaran yang kecil ini mau ngurusin daerah tertinggal, harusnya desa tertinggal yang diurusin, itu yang yang pertama.

Yang kedua, dari Pak Dirjen Transmigrasi, ya, saya kira Dirjen Transmigrasi saya sependapat tadi dengan Pak, siapa yang bertanya di awal sahabat saya, transmigrasi ini, Pak, banyak sekali yang baru kita tempatkan. Saya kira kalau transmigrasi yang sudah lama-lama di masa kolonial dan sebagainya ini sudah banyak yang mandiri, Pak. Kalaupun infrastrukturnya tidak tersedia, saya kira Kementerian ini juga perlu ada mekanisme MoU dengan pemerintah daerah, ada jangka waktu pembinaan.

Kementerian ini ada jangka waktu pembinaan, sehingga tidak selalu disalahkan oleh kementerian, masa ada transmigrasi 20 tahun masih menjadi tugas kementerian, tapi ada transmigrasi yang baru penempatan yang sampai saat ini belum bisa mandiri. Salah satu persoalannya misalnya kemarin Pak Dirjen saya sampaikan soal status tanah mereka.

Saya kasih contoh, Pak, mohon dicatat nanti diperiksa dicek-cek lapangan, untuk Pak Dirjen transmigrasi, ada coba dicek transmigrasi di Kabupaten Morowali, masih di zaman saya dulu penempatan itu belum, itu setengah mati mereka, Pak, transmigrasi unit UPT Buleleng, unit Bahoea, unit Wosu dan unit Umpanga, ini...ini masih banyak persoalan tanah, apalagi infrastruktur dan sebagainya.

Kemudian ada lagi satu, Pak, transmigrasi unit Pute Jaya di Kabupaten Morowali. Ini paling susah, Pak, berada di kontrak karya PT Vale. Sampai hari ini pak kepala desa itu bolak-balik kemari, nanti saya bilang nanti saya ketemu Pak Dirjen saya sampaikan, mereka cari peta transmigrasi tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Ini tumpang tindih dengan lahan area kontrak karya PT Vale, kontrak karya nikel, Pak, kasihan ini mereka *ndak* jelas.

Jadi, mereka akan sampaikan kepada saya kemarin, Pak, desanya minta kalau bisa peta transmigrasi itu mereka cari, Pak, tapi sudah berkali-kali Kementerian tidak dapat-dapat, Pak. Saya kira itu Pak Dirjen transmigrasi itu.

Kemudian, selanjutnya Pak Dirjen pengembangan ekonomi dan investasi. Saya lihat, Pak, di paparan ini ada kegiatan-kegiatan yang 2022 sisa anggarannya masih sangat besar, ini terjadi di...di daerah contoh Direktorat

Pengembangan Produk Unggulan, apa sih masalahnya, Pak, masih banyak sekali anggaran. Orang setengah mati cari anggaran ini *nggak* bisa diselesaikan padahal banyak sekali orang butuh anggaran, ini apa masalahnya ini coba dijelaskan *deh*.

Kemudian satker dinas PMK Papua Barat, Papua, NTT, Maluku, Maluku Utara, ini daerah tertinggal kebanyakan di sini, tertinggal juga, kenapa ini anggarannya masih banyak sekali yang sisa, apa masalahnya? Ini mohon dijelaskan, Pak, supaya kita bisa tau kendalanya sehingga tahun 2023 ke depan kita bisaantisipasi sehingga tidak terjadi, ini menjadi perhatian khusus menurut saya.

Yang kedua soal BUMDes. Saya orang yang sangat mendukung BUMDes Pak, karena itulah pintu masuk kita untuk membangun desa menuju kemandiriannya, tapi mengelola BUMDes ini memang harus dikelola dari hulu ke hilir. Hulunya itu adalah jangan sampai BUMDes ini hadir karena formalitas, kalau bisa BUMDes itu lahir dari bawah sebetulnya jangan dipaksakan seluruh desa di Indonesia ini harus punya BUMDes. Akhirnya karena dipaksakan semua harus punya BUMDes, ya sudah BUMDes-BUMDesan yang terjadi di desa tidak punya potensi dipaksakan. Tapi, juga tidak bisa dipungkiri banyak BUMDes yang luar biasa berhasil, Pak. *Nah*, ini jadi di kalau diperiksa baik-baik dulu dari hulunya.

Kemudian, pendampingannya saya setuju, Pak, ini perlu didampingi, BUMDes-BUMDes yang sudah berhasil itu, yang sudah mulai berhasil itu didampingi sebaik-baiknya. Saya kasih contoh misalnya, dulu ada teman saya Bupati di Sulawesi Selatan, luar biasa BUMDes nya Pak, tapi waktu itu *ndak* tau apa sudah BUMDes atau tidak, Bantaeng ya. Kita sering dulu studi banding ke situ, luar biasa itu bisa menjadi salah satu contoh.

Ada juga beberapa BUMDes Pak, sekarang yang, karena BUMDes ini saya lihat begini yang gambaran saya, ya. BUMDes bisa hadir, bisalah besar kalau istilahnya ada...ada *supply demand*-nya kan di situ, ada usaha, dan usaha BUMDes ini namanya juga BUMDes, di desa biasanya itu harus tersedia dulu lahannya, kalau tidak ada lahannya BUMDes ini hanya akan tinggal bendera, hanya akan tinggal.

Contoh misalnya, sekarang kan Indonesia ini kebanjiran investasi Pak, ini tolong dipayungi BUMDes sehingga mereka bisa ikut andil di dalam investasi yang begitu besar di Indonesia. Masa urusan *supply* telur, ayam, sayur, dan sebagainya itu harus, itu bisa dilibatkan BUMDes dan banyak saya masih saya banyak sekali yang...yang *alhamdulillah* kita kita coba kawinkan mereka dengan...dengan apa, investasi ini berhasil.

Saya kasih contoh Pak, di Kabupaten Morowali itu salah satu kawasan industri, Pak, setiap hari itu memerlukan sayur. Sayur daun ubi itu satu bulan itu 1,2 ton, ini kalau didampingi BUMDes Sulawesi Tengah itu, untuk mereka bisa mensuplai ini luar...hidup ini, hidup ini BUMDes. Jangan cuma BUMDes ini diarahkan terus untuk mengelola uang desa yang kecil itu tapi dia harus

menuju kepada profesionalitasnya dia, *business to business* ini yang harus kita arahkan ke BUMDes-BUMDes kita, itu saran saya soal usaha ini.

Kemudian yang terakhir, dari Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini sesuai dengan nomenklatur kementerian ini, saya lihat Pak penyusunan *Doku* di anggaran 2023 ada penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah tertinggal, direncanakan volumenya 3 rekomendasi kegiatan. Saya ingin mendapatkan gambarnya saja, Pak. Daerah tertinggal di Indonesia ini ada berapa lagi, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mendorong bersama-sama, Pak.

Malu juga ya, kalau tadi ada desa tertinggal kita malu, tapi kalau masih ada daerah tertinggal di Indonesia ini, itu memalukan. Di mana-mana sekarang kita hebat, Bapak Presiden selalu bilang investasi luar biasa Indonesia ini, tapi daerah tertinggal.

Sulawesi Tengah ada 76 triliun investasi yang masuk tahun 2022, 2022, tapi daerah tertinggal masih ada. Ini *problem*-nya di mana ini. Apakah karena kita ini tidak fokus dalam mengelola anggaran sehingga masih ada status-status seperti ini?

Saya berharap *sih* sebenarnya suatu saat Kementerian Daerah Tertinggal ini bubar, bukan bubar karena tidak mampu, tapi bubar karena berhasil. Kenapa, tidak perlu lagi ada daerah tertinggal, ya sudah kalau tidak ada daerah tertinggal ganti nomenklatur, bukan lagi Kementerian Daerah Tertinggal tapi kementerian daerah maju atau daerah mandiri, kan begitu.

Malu kita Pak, jalan tol di mana-mana hebat sekali kita ini Indonesia tapi masih ada Kementerian Daerah Tertinggal, ini sebenarnya malu, malu bangsa kita ini. *Nah*, kami di Komisi V ini ada kan mitra, ada mitra Kementerian Perhubungan, ada Mitra Kementerian PUPR yang bisa *men-support* supaya daerah tertinggal itu segera *entas* dari bumi Indonesia.

Dulu saya masih Bupati, Pak, daerah saya termasuk daerah tertinggal, malu saya kalau pergi ke mana-mana dengar, di situ, saya berhenti jadi Bupati tidak tertinggal lagi daerah saya.

Ini kira-kira beberapa hal-hal yang saya sampaikan, saya sekali lagi terima kasih banyak saya *tau* persis kementerian ini luar biasa, Pak. Orang bilang Kementerian adalah kementerian yang berdarah-darah, kenapa berdarah-darah, otaknya, karena pikirannya terlalu banyak tapi tenaganya terlalu kecil. Saya *tau* Pak Dirjen ini semua orang yang hebat-hebat, yang memikirkan Indonesia, memikirkan desa, daerah, supaya tidak ada yang tertinggal tapi sayangnya anggarannya kecil sekali.

Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, saya mengapresiasi seluruh kegiatan 2022 dan *Insha Allah* 2023 akan lebih baik lagi. Saya kira Pimpinan demikian.

Wallahu musta'an,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam, Pak Anwar Hafid.

Kemudian yang terakhir secara *virtual* ini Pak Sumail, sudah ada Pak Sumail? Sudah ya, silakan Pak. Suaranya Pak, suaranya tidak terdengar suaranya Pak Sumail. Pak Sumail, itu masih di *mute* itu suaranya.

F – P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Bisa didengar suara saya, Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Ya bisa, silakan-silakan, Pak.

F – P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera bagi kita semuanya,

**Pimpinan, dan
Anggota yang saya hormati,
Bu Dirjen,
Pak Dirjen, beserta
Segenap jajaran yang saya muliakan,**

Saya memperhatikan dengan seksama paparan-paparan yang disampaikan oleh direktorat-direktorat yang menjadi mitra daripada Komisi V, khususnya dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Desa dan Pedesaan, Transmigrasi, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Investasi Desa.

Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, atas bantuan terhadap renovasi dan rehabilitasi pasar lokal yang terbakar tempo hari, pasar tradisional dan kepala desa menyampaikan kepada saya untuk disampaikan secara langsung dan juga para pedagang-pedagang di sana yang diketuai oleh Bu Hj. Amalia.

Walaupun besarannya tidak begitu besar akan tetapi mampu kemudian menarik instansi-instansi lain untuk berpartisipasi. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen, hampir setahun pasar itu sudah apa namanya kita rehab dan maka pedagang punya semangat baru untuk menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan dan sekaligus Idul Fitri mereka-mereka bisa berdagang.

Yang kedua, tentu kaitannya dengan serapan anggaran. Dari sisi serapan anggaran ini saya kira sudah sangat baik ya, akan tetapi catatan kami adalah dan menjadi sebuah saran kiranya dari sisi kualitas pelaporan dan pekerjaan, serta kinerja itu juga menunjukkan ke arah yang lebih baik. Saya hanya melihat bahwa dari sisi struktur serapan dari PHLN yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri ini sangat sedikit.

Kita ketahui bersama bahwa, banyak lembaga-lembaga, banyak direktorat-direktorat lain mengharapkan dana, mengharap anggaran, akan tetapi anggaran yang ada tidak terserap dengan baik. Di setiap kesempatan tersebut jangan sampai kita terlalu banyak bergantung kepada APBN murni, kendati PHLN tidak perlu pengembalian, tetapi secara moral kita harus bertanggung jawab dengan baik agar mampu memberikan sentuhan pembangunan terhadap daerah-daerah terlebih-lebih adalah di Kementerian Desa ini.

Yang kedua, terhadap Bu Dirjen. Saya hanya menekankan dua hal Bu Dirjen, terhadap penguatan BUMDes. Yang pertama, harus betul-betul ditekankan bahwa usaha-usaha BUMDes itu betul-betul mengadopsi potensi-potensi lokal ya kira-kira bisa mendongkrak ekonomi, bisa mengungkit perekonomian desa dan tidak bersaing dengan usaha-usaha ekonomi desa yang sudah *existing*.

Maksud saya ada masyarakat di situ punya warung, ada masyarakat di situ berusaha di bidang pertanian, kiranya BUMDes ini tidak menjadi pesaing ya, sehingga nanti bisa mematikan usaha-usaha yang ada di sekitarnya.

Yang kedua, tentu pendampingan. Pendampingan dalam hal kemampuan mengelola tata keuangan yang ada di BUMDes. Di beberapa *leaflet* yang saya baca ini banyak sekali sebenarnya bimtek-bimtek terus kemudian, pelatihan-pelatihan yang bisa memberikan kemanfaatan tambah terhadap SDM-SDM ini.

Sebenarnya, bisa saja Bu Dirjen melibatkan kami-kami ini, Bu, untuk bisa terlibat di desa-desa ataupun dapil-dapil yang kami sementara ini bina, sehingga kini saya belum pernah mendengar kurang *tau* kalau Anggota yang lain barangkali. Saya tidak pernah diundang misalnya menjadi narasumber dalam rangka peningkatan kapasitas baik untuk apa namanya BUMDes maupun di sektor-sektor lain kaitannya dengan peningkatan kapasitas pendamping dan lain-lain sebagainya. Bermitra macam apa yang kita kalau begini, sementara tuntutan di bawah bahwa desa harus maju, harus berkembang dan walaupun ada lembaga-lembaga yang kita *endorse* yang kita dorong harus menunjukkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Yang ketiga, terhadap Pak Dirjen transmigrasi. Pak Dirjen, transmigrasi ini sudah dilakukan sejak orde baru tempo hari ya. Memang membutuhkan jangka panjang sehingga kelihatan benar progres kemajuannya. Satu hal yang paling penting Pak Dirjen, masyarakat transmigrasi itu harus terlindungi ya, harus ada kepastian hukum terhadap status lahan. Tadi disampaikan oleh

pembicara-pembicara terdahulu, masih banyak kerumitan-kerumitan, masih banyak persoalan-persoalan kaitannya dengan status lahan mereka.

Mereka dipindahkan dari Jawa atau daerah sekitar dengan harapan bisa berusaha dan mengubah nasibnya apa lajur ketika *nyampe* di tempat justru mereka seperti dibiarkan dengan kemiskinan-kemiskinan yang mereka alami, bahkan lebih terjerumus lagi karena mereka tidak bisa berusaha. Mau berladang-ladang mereka menjadi milik orang lain. Ini terjadi di banyak tempat.

Tadi juga ada yang menyampaikan bahwa, anak suku dalam, yang mereka juga warga negara Indonesia, yang hak-haknya harus terlindungi, jangan sampai di usia kemerdekaan yang lebih dari 70 tahun ini kita masih melihat di sana sini ada ketidakadilan. Dan, ini menjadi *antitesa* atau menjadi kebalikan dari apa yang diinginkan oleh Pak Presiden kita Pak Jokowi bahwa, penetasan kemiskinan memberikan kesempatan pada seluruh rakyat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan justru hanya menjadi slogan belaka.

Nah, kita tidak ingin ini kemudian masih banyak terlihat di sana-sini di negara Republik Indonesia yang kita cintai yang di mana bahwa sumber daya alamnya luar biasa. Perlu ada *grand design* sebenarnya Pak, perlu ada *roadmap* terhadap pembangunan desa ini.

Saya yakin bila koordinasi dengan baik dengan kementerian dan lembaga maka pembangunan di desa, itu akan berlangsung dengan baik. Kaitannya juga dengan percepatan pembangunan desa tertinggal, masih banyak PR kita, Pak, 62 daerah itu masih menjadi desa tertinggal, sementara betul apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, malu, bahkan memalukan bila masih ada daerah-daerah yang tertinggal.

Tentu yang saya minta pertanggungjawabannya dari Pak Dirjen ini, apa upaya strategisnya dalam rangka kita melenyapkan catatan-catatan buruk di Republik ini. Kira-kira itu, Pak Pimpinan.

Matur nuwun.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Sumail.

Dan, itu tadi Bapak-Bapak-Ibu Dirjen itu menutup pertanyaan-pertanyaan dan pendapat yang telah disampaikan oleh Anggota Komisi V dan selanjutnya kami....

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Pimpinan, izin.

Boleh nambah sedikit ada yang ketinggalan.

KETUA RAPAT:

Sedikit Bu, ya, kita jam 2 masih ada rapat lagi *nih*.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Yang pertama berita tentang ini Bu, anak transmigrasi yang ada di Bulungan Kaltara itu lagi viral sekarang di medsos, itu ditinggal orang tuanya, yang pertama ditinggal ibunya sekarang ditinggal oleh bapaknya. Oleh karena itu, tolong ini ditindaklanjuti. Jadi, anak transmigran yang ada di Bulungan, Kalimantan Utara. Anaknya kecil-kecil masih ini tempatnya juga di apa diperlihatkan.

Kemudian yang kedua, saya lupa tadi menegaskan kembali apa yang kemarin sudah disampaikan terkait dengan BUMDes yang mengadakan...yang melaksanakan MoU dengan Kementerian PUPR terkait dengan BUMDes yang akan bekerjasama untuk menyediakan misalnya kalau ada kegiatan P3TGAI, kemudian mereka menyiapkan semen atau apa nanti belinya di situ. Itu sah-sah saja, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa walaupun *toh* masyarakat menginginkan beli di situ itu *ndak* ada masalah, tapi jangan kemudian dipaksakan untuk beli di situ dan BUMDesnya yang sebelumnya tidak pernah berjualan atau usahanya tidak ada yang namanya bahan bangunan kemudian dipaksakan untuk membeli di BUMDes tersebut.

Kalau memang sebelumnya punya usaha itu *ndak* ada masalah, masyarakat diimbau atau kelompok masyarakatnya diimbau untuk membeli di situ, tetapi jangan juga kemudian merugikan kepada pedagang yang sudah ada sebelumnya dan meskipun sudah ada kerja sama tapi kemudian jangan ini dianggap sebagai satu peraturan yang mengharuskan untuk semuanya melakukan pembelian di BUMDes.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi Bapak-Bapak, Pak Dirjen dan Bu Dirjen, jadi nanti tolong dijawab itu di *cluster* saja, Pak, ya. Tadi, kita melihat tadi pertanyaan dan pendapat dari teman-teman Anggota Komisi V itu kan lebih banyak tentang transmigrasi, kemudian tentang BUMDes, kemudian ada juga sedikit tentang desa tertinggal dan pembangunan desa, jadi dikelompokkan saja tidak usah per orang jadi secara umum saja dan itu mungkin sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman Anggota Komisi V dan saya persilakan kepada Pak Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi, setelah itu Ibu dan selanjutnya Bapak-Bapak sekalian, silakan, Pak.

DIRJEN PPDT KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (Ir. EKO SRI HARYANTO, M.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Tadi beberapa pertanyaan yang kami, saya jawab secara umum. Jadi terkait dengan program pengembangan transmigrasi ini kalau kita merujuk kepada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, jadi ada kebijakan program transmigrasi ini adalah terkait dengan revitalisasi kawasan transmigrasi yang masuk dalam kegiatan prioritas keempat, yaitu pembahasan tertinggal kawasan perbatasan pedesaan dan transmigrasi dan masuk dalam prioritas nasional kedua yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Sasaran programnya adalah terhentasnya 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional dengan status tingkat perkembangan kawasan yang harapan kita bahwa, tahun 2024 ada 7 kawasan yang berdaya saing, 33 kawasan mandiri dan 12 kawasan berkembang. Di samping itu, kita juga mendapat beban yaitu, kegiatan Pembinaan untuk 94 SP Bina atau 11.159 KK dan untuk penempatan transmigran memang sifatnya kita hanya pemenuhan sisa daya tampung saja untuk lokasi-lokasi yang sudah ada sehingga target penempatan transmigran tahun 2022 hanya sebanyak 571 KK dan tahun 2023 hanya sebanyak 200 KK, padahal kita sama-sama ketahui bahwa penempatan transmigran sebelum ini jumlahnya puluhan ribu KK, Pak, penempatan transmigran.

Nah, ini mungkin ini yang menjadi rujukan kita mungkin kita akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan transmigrasi di masa lalu yang masih muncul sehingga kita lebih cenderung kepada revitalisasi kawasan transmigrasi lebih dulu.

Kemudian terkait dengan pembinaan, pembinaan transmigran, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Transmigrasi, di dalam Pasal 32 Ayat (5), ini pembinaan transmigrasi dikatakan bahwa, dalam hal pengembangan masyarakat di permukiman transmigrasi telah mencapai sasaran yang ditetapkan atau paling lama 5 tahun sejak penempatan, paling lama 5 tahun sejak penempatan pengembangan permukiman transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten/kota.

Jadi memang kita dibatasi oleh Undang-Undang atau regulasi memang untuk pembinaan transmigrasi ini hanya 5 tahun. *Nah*, ini menjadi kendala begitu permukiman transmigrasi sudah diserahkan, dialihkan pembinaannya ternyata masih ada permasalahan-permasalahan, ini perlu kolaborasi koordinasi antara pemerintah daerah dengan kita untuk memfasilitasi pengurusan permasalahannya.

Kemudian, terkait dengan permasalahan lahan Pak, sampai saat ini memang kita sudah menginventarisasi kasus permasalahan lahan ya dan saat ini kita sedang mencoba untuk menyelesaikan secara bertahap kasus permasalahan lahan yang ada di lokasi transmigrasi.

Selain itu juga, tadi disampaikan oleh Bu Sri, ada beberapa kegiatan yang mungkin terkait dengan catu pangan beras atau catu pangan non beras yang ada di lokasi Mutim kemudian Teluk Wandama, ini mungkin nanti kita sampaikan, Pak, secara tertulis rinciannya mungkin karena anggarannya mungkin menjadi pertanyaan cukup besar, nanti kita sampaikan atau perlu dijelaskan Bu Sri? Saya rasa...

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Silakan secara tertulis *nggak* apa-apa Pak, termasuk gereja tadi *kok* bisa sama itu anggarannya.

DIRJEN PPDT KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (Ir. EKO SRI HARYANTO, M.M.):

Baik.

Mungkin itu Pimpinan. yang bisa kami jawab secara umum untuk bidang transmigrasi, nanti kalau ada kekurangan akan kita lengkapi lebih lanjut secara tertulis.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya silakan, Bu.

DIRJEN PEID-DTT KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (Ir. HARLINA SULISTYORINI, M.Si.):

Terima kasih, Pak.

Terima kasih Bapak dan Ibu untuk masukan dan arahnya.

Yang pertama dari Direktorat Jenderal PEI terkait dengan BUMDes, terkait dengan penguatan BUMDes, Ibu, izin terkait dengan *roadmap* memang kita pasti akan memadukan antar UK-1, kemudian untuk terkait penguatan SDM kita melakukan konsolidasi dan kerja sama dengan BPSDM Bapak, sehingga nanti pelatihan semua tersentral di BPSDM.

Yang berikutnya, terkait dengan MoU dengan Kementerian PUPR, ini juga terkait peran BUMDes. Jadi, memang kita memastikan dan mewajibkan BUMDes ini tidak menjadi kompetitor bagi pelaku usaha di desa, tetapi dia

menjadi rumah atau menjadi pendukung untuk kegiatan UMKM dan IKM yang ada di desa, *nah* itu yang kami tindak...himbau kepada dan kita wajibkan kepada para BUMDes .

Kemudian terkait dengan lanjutan Kementerian PU selain sebagai tadi pendukung Ibu, kita juga dengan PU, BUMDes sebagai pengelola kegiatan atau penerima barang misalnya PAMSIMAS. Ketika badan atau kegiatan pengelolaan air sudah selesai kemudian ada pemeliharaan mereka bekerja sama dengan BUMDes untuk bisa selalu menjaga keberlangsungan keberadaan PAMSIMAS, kemudian juga beberapa *homestay* kita juga melakukan kerja sama dengan Kementerian PUPR.

Kemudian, berikutnya terkait dengan tempat Pak Sigit. Izin Pak Sigit, kami sudah melakukan konsolidasi, Bapak, dengan teman-teman di desa Ngingas Sidoarjo dan mereka kita minta untuk berkoordinasi dulu dengan dinas KLHK setempat dan dinas PMD, kalau memang masih ada kesulitan kita akan melakukan kunjungan ke sana.

Dan, berikutnya juga terkait dengan CSR-CSR yang perusahaan besar, termasuk dengan Angkasa Pura di sekitar Juanda, kami akan tindaklanjuti untuk selanjutnya.

Dan, terakhir menjawab pertanyaan terkait dengan PHLN, Bapak. Jadi, memang PHLN ini kami terima mulai kerja sama ini dengan *loan* IFAD itu dimulai di tahun 2019, izin dan kemudian kita mulai melaksanakan preparasi dan kegiatannya di 2020 yang memang pada saat itu karena masa-masa ada pandemi dan persiapan terkendala sehingga berkelanjutan, tapi sekarang kita sudah memulai dan tahun 2022 kemarin dengan IFAD kita sudah mempunyai kesepakatan untuk menyederhanakan komponen, penataan struktur ulang, kemudian juga melakukan *re-design* sehingga kami berharap mulai awal tahun ini kita sudah melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang kemarin tertunda. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami laporkan di Ditjen PEI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu.

Ya silakan, Pak Dirjen.

DIRJEN PDP KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Izin kami mencoba merespon dari berbagai masukan, saran sekaligus mungkin pertanyaan.

Yang pertama, di dalam RPJMN kita mempunyai target untuk menambah perkembangan desa, yakni desa yang berkembang menjadi 10 ribu dan desa yang mandiri adalah 5 ribu. Karena itu dari target RPJMN tersebut kita memiliki *tool* untuk melihat itu, yakni melalui yang disebut dengan indeks desa membangun, di mana bahwa di indeks desa membangun ini, kita untuk melihat tingkat perkembangan desa yang dipastikan jadi desa yang sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri tadi.

Nah, dari *tool* ini memang ada yang menjadi kewenangan di desa, ada yang menjadi kewenangan di kabupaten, ada yang menjadi kewenangan provinsi, juga ada kewenangan pusat dan *stakeholder*. *Nah*, di situlah kemudian berbagai kebijakan kita di dalam rangka menangani desa ini untuk perkembangan desa kita arahkan ke sana.

Artinya apa, di dalam *roadmap* kita adalah ketika desa itu pada posisi misalnya tertinggal, tertinggalnya di mana? Apa? Dan, inilah yang menjadi rujukan kita dalam berkoordinasi, baik di dalam menyusun prioritas penggunaan dana desa maupun tematik dan berkoordinasi dengan *stakeholder* lain termasuk kementerian/lembaga dan daerah.

Perlu kami laporkan bahwa, dari target tadi di mana yang misalnya desa yang mandiri pada tahun 2015 ini setiap tahun kita melakukan pengukuran bahwa dari 174 saat ini sudah ada di 6.238 dari 174. Kemudian, desa yang tertinggal, yang sebelumnya di tahun 2015 itu 33.592 saat ini menyisakan tinggal 9.584 dan desa yang sangat tertinggal dari 13.453 saat ini tinggal 4.982. Artinya, dari tahun ke tahun memang tingkat perkembangannya cukup signifikan meskipun memang belum...belum nol.

Nah, inilah yang kemudian menjadi bagian dari upaya kami melakukan koordinasi sekaligus menjadi *roadmap* kami, tapi kalau misalnya tadi ukurannya target 2024 *Insha Allah*, tercapai tetapi memang kita tidak cukup puas di situ, kita terus melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk mendorong agar desa-desa tadi menjadi lebih ada percepatan, sehingga daerah pun kita juga dorong dari melihat dari indikator tadi pemerintah daerah juga melihat apa yang membuat ketertinggalan desanya di daerahnya.

Mohon izin, Pak Ketua dan Bapak-Ibu sekalian. Saat ini sudah ada lima provinsi yang sudah terbebas dari desa yang sangat tertinggal dan tertinggal. Yang pertama, diawali oleh tiga provinsi Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali, itu di tahun 2020. Kemudian, di tahun 2021 provinsi besar Jawa Timur, kemudian tahun 2022 kemarin, provinsi Jawa Barat dan ini sedang kita lakukan pengukuran kembali *Insha Allah* nanti di bulan Juli akan kita rilis kembali dari hasil pengukuran, harapannya kita semakin signifikan, itu juga menjadi bagian dari *roadmap* kami terkait dengan mendorong desa yang perkembangan desa.

Nah, keterpaduan demikian juga tadi seperti disampaikan oleh Bu Dirjen Lina, misalnya di kami di dalam prioritas pengguna dan desa mengalokasikan memberikan menu atau ruang digunakan untuk pemulihan ekonomi, digunakan untuk prioritas nasional, pemulihan ekonomi misalnya untuk pembiayaan atau

dukungan model BUMDes, kemudian bagaimana pengelolaannya di situ nanti kaitannya dengan bagaimana integrasi di dalam tadi apa koordinasi sebagaimana, kemudian yang membina adalah di Bu Lina.

Demikian, juga dengan eksternal termasuk *stunting*. Di *stunting* kami di dalam Perpres Nomor 72 tahun 2021 menjadi bagian dari upaya, dalam rangka upaya penanganan *stunting* di mana tugasnya salah satunya adalah bagaimana desa ini berkinerja baik programnya di dalam rangka APBDes menunjang *stunting* yakni baik di dalam pola spesifik maupun sensitif. Karena itu upaya-upaya yang kami lakukan, peningkatan kapasitas tadi sebagaimana ditanyakan juga Pak, mohon izin, kapasitas itu adalah untuk kader posyandu, para pendamping desa, aparatur desa, bagaimana menyusun penganggaran di desa juga berpihak kepada upaya-upaya penanganan *stunting* tadi sehingga melalui berbagai kader termasuk KPM namanya juga ada kader pembangunan manusia yang ada di desa yang salah satu tugasnya adalah perbantuan tugas dengan bidan, dengan tenaga medis yang ada di desa, di posyandu dan sebagainya.

Dan inilah, kita punya *roadmap* juga dari tahun ke tahun harapannya pada tahun 2024 nanti, ada 90% desa di Indonesia berkinerja baik dalam mengelola *stunting* melalui indikator-indikator sebagaimana yang kami sampaikan tadi.

Kemudian, yang berikutnya terkait dengan program tadi ada penanyaan terkait dengan sosialisasi dengan...karena juga mohon izin di misalnya desa bersih narkoba tadi, kita termasuk dalam bagian dari rencana aksi nasional di W4GN, di mana kita juga harus menyusun berbagai panduan kemudian kita sosialisasikan bersama dengan...baik dari BNN, kemudian dari polhukam, PMK, Kemendagri dan sebagainya, di tahun 2022 kemarin kita ada di 8 desa di 6 kabupaten sehingga kalau dikatakan anggaran tadi sebenarnya ya tidak terlalu mewah kalau dianggap tadi katakan anggarannya besar dapat karena di 6 kabupaten, Pak, jadi ini harapannya menjadi juga contoh-contoh praktik baik yang bisa dilakukan di tempat lain.

Kemudian PAMSIMAS, karena saat ini PAMSIMAS sudah ada pengakhiran. Saat ini ada tiga, paling tidak data kami ada 35.928 desa yang mengelola pamsimas berada di 408 kabupaten dan di 33 provinsi. Ketika pengakhiran akan, PAMSIMAS ada dua, yang pertama inflasi itu dibangun oleh PUPR sedangkan kelembagaan didampingi oleh Kemendesdesa.

Nah, bagaimana pengakhiran ini memiliki keberlanjutan, maka buku saku yang dikatakan tadi untuk memberikan *guidance* atau panduan bagi desa kelembagaan ini mau berafiliasi ke mana. Harapannya adalah ini kembali kepada desa menjadi aset desa sehingga desa bisa melakukan intervensi karena kalau selama ini kan, dikelola oleh kelompok yang secara asetnya belum pada menjadi aset desa, itulah tadi kaitannya dengan juga di BUMDes ketika menjadikan desa perlu dukungan dan juga di salah satu unitnya BUMDes misalnya juga bisa dilakukan.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan persyaratan desa yang menerima desa wisata. Ini prinsipnya adalah karena desa wisata itu dikenal apa pentahapannya ada yang dicari rintisan, berkembang, maju dan mandiri.

Nah, kita berupaya untuk bisa masuk mulai dari dari berkembang. Kenapa berkembang, karena kalau rintisan itu kategorinya itu adalah di desa itu ada potensi pariwisata tapi desanya belum *ngapa-ngapain*. Harapannya apa, ketika dia sudah berkembang artinya desa sudah mulai intervensi sehingga ini menjadi harapan menjadi stimulan.

Nah, kemudian persyaratan yang berikutnya adalah dikelola oleh BUMDes. Karena kita ada unsur pemberdayaannya dan itu milik desa bukan milik perorangan, karena ada juga wisata itu ada di desa tapi bukan milik desa, baik milik perorangan atau milik swasta. Itulah yang membedakan, mohon izin, Pak Toriq tadi dengan yang dikelola oleh Parekraf.

Parekraf tidak masuk pada ruang ini, Parekraf contohnya kemarin melakukan lomba *asih dewi* apa...maaf lomba desa wisata tapi mereka melakukan lombanya adalah penilaian, tetapi intervensi secara bantuan dan sebagainya mereka tidak lakukan tetapi kami berkoordinasi misalnya untuk *soft skill* nya mereka untuk bisa sinergi, jadi kami (*suara kurang jelas*) juga tidak ada tumpang tindih.

Memang kalau ditanyakan soal *outcome* kami belum bisa melihat secara detail, tapi perlu kami berikan contoh misalnya di Kabupaten Bandung, kemudian di Magetan, di Ponorogo, Kuningan, Majalengka, itu setelah kita bantu ada yang signifikan. Contoh di Magetan itu saat ini omsetnya sudah 1 miliar lebih desa wisata yang dikelola. Kemudian, di tahun 2021 itu aspirasinya Bu Sri Wahyuni kemarin kami datang sebulan sudah bisa menghasilkan antara 20-30 juta omset yang berputar, ini saya pikir juga mikir dampak yang signifikan. Memang kita belum sampai kaji mendalam terkait dengan *impact*-nya.

Kemudian, terkait dengan adanya desa untuk covid, sebenarnya kita sudah di tahun 2023 ini sudah tidak ada lagi dana desa yang digunakan untuk covid tapi digunakan dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional, prioritas nasional dan penanganan bencana alam maupun non alam, sehingga yang dikatakan covid agar dialihkan ke kegiatan lain sebenarnya sudah fleksibel ada di desa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang ada di desa.

Dan, mohon izin Bu Eem kami laporkan, yang teman-teman dari suku anak dalam kemarin udah ketemu dengan kami, datang ke Kementerian dan kami melakukan audiensi memang seperti saya sampaikan Bu Eem tadi mohon maaf memang kelihatannya tidak sederhana itu yang kita lihat, tapi kami dengan berbagai data kami kemarin sudah koordinasi dengan pemerintah daerah salah satunya dengan kepala dinas PMD provinsi dan kami tunjuk staf kami untuk juga melakukan koordinasi terkait karena ini sebenarnya ada perannya multi Bu, mungkin nanti dukungannya baik ada di Kemendagri.

Dan, saat ini memang untuk RUU terkait dengan adat ini masih-masih berproses mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk mendorong itu dan kami akan *support* dalam rangka untuk mencari solusi-solusi, mudah-mudahan dengan koordinasi dan dukungan dari politik dari Bapak-Ibu dari DPR RI ini kami sangat harapkan

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya Bu Sri, silakan.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Terkait dengan apa yang disampaikan. Pak, di Indonesia ini kan tidak hanya agama Islam, Hindu, Budha, Konghucu, kemudian Kristen, Katolik saja, tetapi kan ada berbagai macam kepercayaan sehingga jangan dipaksakan untuk masuk dalam satu agama. Kalau memang dia dalam koordinasinya Bapak, masyarakat itu menginginkan untuk ke aliran kepercayaan, karena itu tidak bisa dipaksakan.

Nggak ini-ini saran saya, jadi kalau misalnya apalagi kalau di daerah luar Jawa itu ya itu kan banyak sekali memang hal itu dan itu dijamin oleh Undang-Undang dan di Indonesia sudah ada hal tersebut.

Terima kasih.

DIRJEN PDP KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Terima kasih, Ibu Sri.

Maksud kami adalah bukan-bukan kami mengarahkan kepada agama tertentu, tapi terkait dengan layanan dasar tadi, Bu, yang ingin kita dorong. Karena mereka belum punya KTP, akses untuk kesehatan juga terbatas dan mereka masih saat ini kesannya nomaden yang katakan tadi sebenarnya adalah karena terdesak oleh adanya HGU dan kondisi lain yang, kita ingin mendorong pada sisi hak-hak sebagai warga negaranya tadi. Nanti mohon dukungannya juga kami koordinasi lebih lanjut.

Dan mohon izin Pak Sudjadi, memang satu sisi masih terkait dengan keterikatan peraturan perpajakan kami koordinasikan sebagaimana saran Pak Sudjadi.

Mohon izin tadi dari, Pak

F – PDIP (Ir. SUDJADI):

Begini, saya tadi hanya menyarankan mungkin staf Bapak bisa belajar dari SDA, P3TGAI itu memang lalu tidak diwajibkan membayar pajak. Kalau tidak diwajibkan, kan lumayan 12%.

Yang kedua, bagi teman-teman kementerian jangan salah tafsir bahwa bantuan pusat itu dikasihkan kelompok, itu tergantung jenisnya. Kalau sapi kelompok, kalau apa asintan kelompok, tapi kalau irigasi desa, tidak, karena yang punya irigasi itu pemerintahan desa. Jadi, terserah tinggal kecepatan kepala desa masukkan BUMDes atau tidak, jadi jangan sampai ada pemahaman kalau dari pusat, ini zaman orde baru, Pak.

DIRJEN PDP KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Izin kami lanjutkan.

Terima kasih, Pak Sudjadi saran *Insy Allah* akan kami koordinasikan. Terus terkait dengan, nanti mohon izin Pak Sigit untuk lokasinya *nggih*, kiranya untuk kami jelaskan nanti untuk lebih melihat ke detailnya untuk advokasi kepada desa yang-yang dimaksud tadi, Pak, terkait dengan, advokasi terkait dengan peraturan desa dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa.

Dan paling akhir, mohon izin terkait dengan upaya-upaya termasuk yang disampaikan, mohon izin Pak Nur Hamid, saya pikir sudah menjadi kami jawab dan terima kasih masukkan sarannya mudah-mudahan kami bisa lebih baik di ke depan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Silakan, Pak.

DIRJEN PPKT KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRIASI RI (Ir. RAJUMBER PRIHATIN, M.Si.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Bapak-Ibu yang kami hormati dan kami muliakan,

Terima kasih atas beberapa saran, namun demikian kami perlu akan menanggapi hal-hal yang perlu untuk Bapak-Ibu ketahui. Jadi, tentang daerah tertinggal memang kita ada masih ada 62 daerah tertinggal berdasarkan Perpres 63 Tahun 2020.

Kenapa daerah tertinggal? Itu karena ada beberapa faktor yang-yang menjadikan daerah itu tertinggal. Faktor yang pertama adalah tentang perekonomian masyarakat, yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga adalah sarana prasarana keterbatasan, yang keempat itu adalah kemampuan keuangan daerah itu juga menjadi bagian dari ketertinggalan, lalu yang berikutnya yang kelima adalah aksesibilitas dan yang keenam itu adalah tentang karakteristik daerah, itu misalnya terjadi gejolak sosial, bencana alam, dan sebagainya. Jadi, ada 6 itu diatur dalam PP 78 Tahun 2014 terdiri dari 14, 22 kriteria.

Nah, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi. Dimandatkan bahwa 5 tahun menyusun strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kita sudah ada Bapak-Ibu jadi kita sudah ada Stranas Tahun 2019 sampai tahun 2024 itu di Perpres Nomor 105 jadi itu sudah ada. Lalu tugas kita karena itu harus di-*breakdown* per tahun, jadi per tahun kita *breakdown*.

Nah, per tahun disebut dengan rencana aksi percepatan bangunan daerah tertinggal, rencana aksi. Jadi, misalnya tahun sekarang ini kita lagi mempersiapkan rencana aksi tahun 2024, itu yang terjadi. *Nah*, perlu kami sampaikan untuk sebagai gambaran untuk tahun 2022 dan '23, jadi tahun 2022 kita tuh diampu oleh 21 kementerian dan lembaga dan jumlah kegiatannya adalah 2.439 kegiatan di daerah tertinggal, jadi nanti istilahnya keroyokan.

Jadi kita koordinasikan, kita percepat itu pemihakan dan fokus, jadi fokus kepada 6 hal tadi dan pemihakan kepada daerah tertinggal. Kita ada 2.439 di 21 K/L yang kita keluarkan di dalam rencana aksi dan tadi kami laporkan 60% itu afirmasinya, jadi yang terealisasi, jadi yang direncanakan, dilaksanakan ada 60% itu-itu yang terjadi.

Nah, yang tahun 2023 kita sudah ada rencana aksinya, sudah ditetapkan dan akan dijalankan tahun ini, itu jumlahnya ada 1.464 kegiatan, di 24 K/L, kementerian/lembaga itu sudah terbit dan kita targetnya adalah 70% itu dilaksanakan dari 1.464 kegiatan.

Kalau kita lihat, kita...kita sandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan karena 62 daerah tertinggal itu yang paling banyak itu ada di Papua dan Papua Barat, itu ada 30 dari 32. Yang nomor dua adalah di NTT ada 14, lalu di Sumatera itu ada 7, di Sulawesi Tengah itu ada 3 kan begitu.

Nah, kalau kita lihat komposisi dari strategi kita, karena mendorong K/L itu berpihak kepada daerah tertinggal, karena Papua yang paling banyak, Papua itu ada 666 kegiatan itu dari 24 K/L tadi, lalu Maluku itu ada 189, Nusa Tenggara karena dia juga 14 daerah tertinggal itu 418, Sulawesi ada 56 kegiatan, lalu yang di Sumatera itu ada 127 kegiatan. Jadi, kalau kita jumlah 1.464 kegiatan.

Nah, ini sudah kita konsolidasikan dan kita juga harus melakukan pembinaan atau membina komitmen koordinasi dengan K/L sekaligus hubungan dengan daerah. Jadi, itu yang-yang kita kerjakan.

Jadi tahun berikutnya tahun 2024 nanti kita juga akan mengerjakan dan sekarang kita lagi konsolidasi. Jadi kita sudah konsultasi dengan pemerintah daerah dan usulan-usulan udah masuk dan kita konsolidasi dengan K/L sekarang itu. Jadi kita sudah masuk kepada rakor pusat, supaya nanti kita tidak tertinggal di dalam pelaksanaan untuk berikutnya.

Lalu apa tadi yang misalnya kebijakan-kebijakan tadi, kebijakan yang pertama adalah memang kita harus mengeluarkan rencana aksi tahun 2024, harus, itu per Juni tahun 2023 harus terbit supaya nanti tidak tertinggal untuk pelaksanaan tahun 2024. Yang berikutnya, mengevaluasi pelaksanaan tahun 2023 dan '22. Dievaluasi, mana yang ada kekurangan itu ada harus ada kebijakan evaluasi dan arah strategi kita itu. Yang berikutnya adalah kebijakan yang ketiga dalam *me-review* PP 78 Tahun 2014 yang nanti kita sudah menginjak kepada rencana pembangunan jangka panjang yang berikutnya, ini yang perlu kita persiapkan ke depan. Jadi, demikian Bapak dan Ibu sekalian yang kita persiapkan untuk daerah tertinggal.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak-Bapak para Dirjen dan Ibu Dirjen. Demikianlah pendapat telah disampaikan oleh Anggota kemudian sudah dijawab oleh Bapak-Ibu para Dirjen dan saat ini kita masuk kepada draf kesimpulan, tolong ditayangkan.

DRAF KESIMPULAN PADA RAPAT RDP PADA PAGI DAN MENJELANG SIANG HARI INI RABU, 8 FEBRUARI 2023.

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran unit organisasi Eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam APBN Tahun 2022:
 - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas pencapaian realisasi dalam tahun anggaran 2022 sebagai berikut:
 - i. Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar 96,86%, Realisasi Fisik Tahun 2022 sebesar 97,82%.
 - ii. Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Realisasi Keuangannya sebesar 77,83%, Realisasi Fisik Tahun 2022 sebesar 86,19%.
 - iii. Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Realisasi Keuangan sebesar 96,82%, Realisasi Fisik sebesar 97,91%.
 - iv. Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Realisasi Keuangan sebesar 98,63%, Realisasi Fisik Tahun 2022 sebesar 99%.
 - b. Terhadap program ataupun kegiatan di tahun 2022 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta masing-masing unit organisasi Eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis ada pelaksana, pelaksanaan program ataupun kegiatan tahun 2022 sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya.

2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Pedesaan, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 dengan memperhatikan saran, masukan, dan usulan dari Anggota Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Pedesaan, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, untuk:
 - a. Menyampaikan *roadmap* dan capaian untuk setiap program kegiatan sampai dengan tahun yang berjalan.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan kinerja BUMDes , serta melaporkannya kepada Komisi V DPR RI.
 - c. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan *stakeholder* terkait lainnya dalam mengembangkan desa wisata dan pengentasan daerah tertinggal.
 - d. Mempercepat penyelesaian sertifikat hak milik lahan transmigrasi, dan
 - e. Meningkatkan pembinaan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Anggota dulu, Bapak, Bapak-Ibu sekalian, apakah ada tambahan atau pengurangan?

F – PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Izin, Ketua.

Mohon maaf tadi terlambat, mungkin saya hanya ingin kemarin ketika rapat dengan sekjen, ada beberapa catatan yang saya sampaikan, saya tidak tau kalau tidak salah kemarin tidak masuk dalam kesimpulan, salah satunya adalah tentang rancangan peraturan Menteri Desa terkait penggunaan dana desa. Ini kan selalu kita kritisi, kita *taunya* itu sudah selesai dibuat baru kemudian ada polemik-polemik, karena mudah-mudahan kalau tidak kemarin kita sudah masuk dalam kesimpulan kalau bisa ini masuk dalam kesimpulan agar bahwasanya Kemendes sebelum mengeluarkan Peraturan Menteri Desa itu terkait penggunaan anggaran dana desa itu, agar melakukan rapat koordinasi dengan Komisi V.

Mohon kalau Ketua, memang kemarin sebetulnya ingin saya sampaikan juga karena sudah habis waktunya kalau bisa masuk dalam agenda rapat,

supaya kesimpulan-kesimpulan rapat kita ini tidak selalu normatif sehingga tidak ada pergerakan untuk kemajuan. Kita ingin lebih tegas dan berisi begitu.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Syahrul, itu idenya cukup baik saya sepakat, tapi alangkah baiknya nanti itu kesimpulannya kita masukkan pada waktu kita rapat dengan Raker sama Menteri, kita akan melaksanakan Raker dengan Menteri karena mengambil keputusan kan Menteri juga. Ada lag, Pak? Cukup? Atau ada tambahan? Cukup. Dari pemerintah? Ada, Pak, ada yang perlu ditambahkan apa cukup? Ya silakan, Pak.

DIRJEN PDP KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Mohon izin, Pimpinan.

Untuk tiga, angka tiga poin a, barangkali menyampaikan *roadmap* dan capaian setiap program saja Pimpinan tidak kegiatan, kalau kegiatan kan banyak, mungkin terlalu kecil-kecil mungkin.

KETUA RAPAT:

Iya boleh-boleh, kegiatannya dihapus aja, ya. Menyampaikan *roadmap* itu ya apa, ya Pak, apanya itu ya rancangan *roadmap*, *map*, peta-peta, peta jalannya, atau bahasa Indonesia saja ya.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Nyambung, saya selama ini *tuh nggak* pernah kementerian diminta *roadmap* itu.

KETUA RAPAT:

Itu-itu kalimat *roadmap*-nya kita hapus atau poinnya kita hapus?

F – P. DEMOKRAT (Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Izin, izin Pimpinan.

Mungkin maksudnya *roadmap* itu berkaitan dengan tadi pengentasan daerah tertinggal itu yang dari kemarin kita diskusikan itu, jadi perlu ada *roadmap* kita sampai tahun berapa Indonesia ini bebas dari daerah tertinggal dan desa tertinggal. Kalau kegiatan program ya, tidak perlu *roadmap* saya kira.

KETUA RAPAT:

Ini saja begini, poin a, itu menyampaikan dan apa menyampaikan capaian, *roadmap* kita hapus aja ya, *roadmap* dan capaian kan hampir sama itu sebenarnya. Ya, jadi menyampaikan capaian apa-apa yang sudah dicapai dengan program begitu ya, Pak, sepakat ya? Ada lagi Pak tambahan? Cukup? Cukup ya, kalo cukup kita setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu hadirin hadirat sekalian,

Dengan disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan. Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi V, mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Sebelum rangkaian acara hari ini kita tutup kami berikan kesempatan kepada salah satu Dirjen untuk menyampaikan kata penutup, silakan Pak, salah satu saja.

DIRJEN PPDT KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (Ir. EKO SRI HARYANTO, M.M.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati dan kami muliakan Bapak Pimpinan, dan
Seluruh Anggota Komisi V DPR RI,**

Pada kesempatan yang baik ini kami terima kasih karena banyak masukan dan saran untuk perbaikan tahun ini dan tahun depan *gitu ya*, karena hal ini sudah pasti kita sudah mencatat semua apa yang menjadi saran dan masukan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita segera memberikan jawaban atas catatan itu dan sekaligus juga memperbaiki untuk di dalam kegiatan. Jadi tidak hanya cukup di dalam tulisan, tetapi kita ingin wujudkan beberapa permasalahan tadi menjadi hal yang lebih baik.

Yang berikutnya, kami mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan di dalam menyampaikan, karena ada keterbatasan di dalam menyampaikan terutama kepada Bapak-Ibu sekalian.

Dan yang terakhir, kami ingin terus mendapat bimbingan dan saran di dalam pelaksanaan kegiatan, program atau kegiatan untuk di masa-masa mendatang.

Terima kasih, dan

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Dirjen.

Demikian maka rapat dengan pendapat pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.00 WIB)

JAKARTA, 8 Februari 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002